



LAPORAN KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2025

**PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA KENDARI
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

LEMBAR PENGESAHAN



LAPORAN KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2025 PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA KENDARI

Kendari, 21 Oktober 2025

Disetujui oleh:

Penanggung Jawab,
Kepala Pelabuhan Perikanan
Samudera Kendari



Ditandatangani
Secara Elektronik

Asep Saepulloh, S.P., M.Si

Disusun oleh:

Ketua Tim,
Kepala Subbagian Umum



Ditandatangani
Secara Elektronik

Rasdiana Alimuddin, S.Pi

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja PPS Kendari Triwulan III Tahun 2025 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan prinsip akuntabilitas dan transparansi PPS Kendari kepada publik dengan mengacu kepada ketentuan PP Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pencapaian pada tahun 2020 merupakan pencapaian yang dijadikan dasar (*base line*) untuk menetapkan target pada tahun - tahun berikutnya yang kemungkinan besar akan berdampak pada reviu beberapa dokumen perencanaan di tahun 2025.

Melalui laporan ini diharapkan agar pembaca dapat memahami upaya - upaya yang telah dilakukan Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari dalam rangka mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam kontrak kinerja bersama dengan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Diharapkan pula agar diperoleh masukan dan saran yang positif guna perbaikan kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari pada tahun berikutnya.

Kendari, 21 Oktober 2025

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR GRAFIK	vii
EXECUTIVE SUMMARY	viii
BAB I	
PENDAHULUAN	10
1.1 LATAR BELAKANG	10
1.2 TUGAS DAN FUNGSI	11
1.3 SDM PELABUHAN	13
1.4 PERMASALAHAN	14
1.5 SISTEMATIKA PENYAJIAN	18
BAB II	20
PERENCANAAN KINERJA	20
2.1 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025 - 2029	20
2.2 TUJUAN DAN SASARAN KEGIATAN	8
2.3 INDIKATOR KINERJA TAHUN 2025	10
2.4 RENCANA AKSI	12
BAB III	15
AKUNTABILITAS KINERJA	15
3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	15
3.2 REALISASI ANGGARAN	72
BAB IV	74
PENUTUP	74
4.1. KESIMPULAN	74
4.2. TINDAK LANJUT REKOMENDASI PERIODE SEBELUMNYA	74
4.3. REKOMENDASI TINDAK LANJUT	75
LAMPIRAN	76

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Komposisi ASN PPS Kendari Tahun 2025 Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin	14
Tabel 2. Indikator Kinerja Tahun 2025 Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari.....	11
Tabel 3. Komposisi Anggaran Berdasarkan Jenis Kegiatan Tahun 2025	12
Tabel 4. Rencana Aksi Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari Tahun 2025.....	13
Tabel 5. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari Triwulan III Tahun 2025	15
Tabel 6. Capaian Indikator Kinerja "Penerimaan PNBP non SDA di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari" Triwulan III Tahun 2025.....	18
Tabel 7. Laporan Target & Realisasi PNBP Per Akun Triwulan III Tahun 2025	18
Tabel 8. Capaian Indikator Kinerja "Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari" Triwulan III Tahun 2025	22
Tabel 9. Capaian Bulanan Indikator Kinerja "Persentase Permohonan Pengusahaan yang Dianalisa dan/atau Dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari" Triwulan III Tahun 2025.....	27
Tabel 10. Capaian Indikator Kinerja "Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari" Triwulan III Tahun 2025.....	29
Tabel 11. Capaian Bulanan Indikator Kinerja "Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari" Triwulan III Tahun 2025	31
Tabel 12. Capaian Indikator Kinerja "Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari" Triwulan III Tahun 2025	34
Tabel 13. Capaian Indikator Kinerja "Nilai Pengendalian Lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari" Triwulan III Tahun 2025.....	36
Tabel 14. Capaian Indikator Kinerja "Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan" Triwulan III Tahun 2025.....	39
Tabel 15. Capaian Indikator Kinerja "Presentase Hasil Rekomendasi Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari" Triwulan III Tahun 2025	53
Tabel 18. Kategori Penilaian Mandiri SAKIP	55
Tabel 17. Capaian Indikator Kinerja "Presentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SiRUP di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari" Triwulan III Tahun 2025	65

Tabel 18. Hasil Perhitungan Capaian “Presentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SiRUP di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari” Triwulan III Tahun 2025	65
Tabel 19. Capaian Indikator Kinerja “Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari” Triwulan III Tahun 2025.....	71
Tabel 20. Pagu dan Realisasi Keuangan Triwulan III Tahun 2025 Berdasarkan Jenis Belanja	73
Tabel 21. Pagu dan Realisasi Keuangan Triwulan III Tahun 2025 Berdasarkan Kegiatan....	73

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari Tahun 2025.....	13
Gambar 2. Fokus Arah Kebijakan RPJPN Tahun 2025-2045 Tahap I.....	21
Gambar 3. Kebijakan Pembangunan Ekonomi Biru	23
Gambar 4. Kegiatan Penunjang Pencapaian PNBPN Non SDA	21
Gambar 5. Kegiatan Penunjang Pencapaian IKU Volume Produksi Perikanan Tangkap	26
Gambar 6. Sertifikat Penghargaan Indikator Kinerja Pelabuhan Triwulan III dengan predikat SANGAT BAIK.....	31
Gambar 7. Kegiatan Penunjang Pencapaian Tingkat Kinerja Kesyahbandaran	33
Gambar 8. Kegiatan Penunjang Pencapaian Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari.....	35
Gambar 9. Kegiatan Penunjang Pencapaian Nilai Pengendalian Lingkungan	38
Gambar 10. Kegiatan Penunjang Pencapaian Kapal Perikanan Izin Daerah.....	41
Gambar 11. Kegiatan Penunjang IKU Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan.....	50
Gambar 12. Penunjang Pencapaian Nilai PM WBK ZI	52
Gambar 13. Kegiatan Penunjang Pencapaian Presentase Hasil Pengawasan Triwulan III ...	54
Gambar 14. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	56
Gambar 15. Perjanjian Kinerja Tahun Perubahan I Tahun 2025.....	56
Gambar 16. Dokumen rencana aksi, manual IKU, dan rincian indikator kinerja.....	57
Gambar 17. Publikasi Capaian IKU Semester I Tahun 2025	57
Gambar 18. Perhitungan Dimensi Kualifikasi Pendidikan IP ASN	59
Gambar 19. Perhitungan Dimensi Kompetensi IP ASN.....	60
Gambar 20. Perhitungan Dimensi Kinerja IP ASN	60
Gambar 21. Perhitungan Dimensi Disiplin IP ASN	60
Gambar 22. Kategori Penilaian Tingkat IP ASN	61
Gambar 23. Kegiatan Penunjang Pencapaian IP ASN PPS Kendari	63

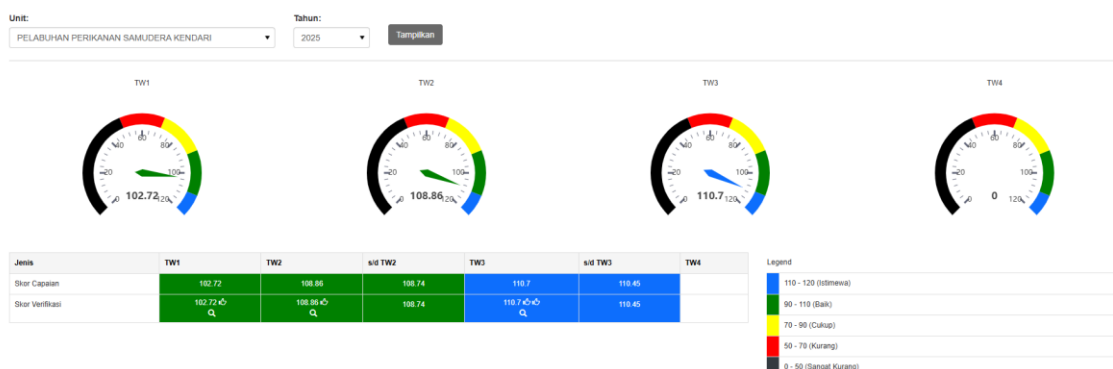
DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Capaian PNBPN Non SDA Triwulan III	19
Grafik 2. Perbandingan Capaian IKU Penerimaan PNBPN Triwulan III Tahun 2020 - 2025	20
Grafik 3. Rekapitulasi Jumlah Produksi Triwulan III PPS Kendari	22
Grafik 4. Capaian Nilai Produksi Triwulan III PPS Kendari	23
Grafik 5. Perbandingan Capaian Volume Produksi.....	23
Grafik 6. Capaian Indikator Kinerja Pelabuhan Triwulan III Tahun 2025	29
Grafik 7. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Pelabuhan Triwulan III Tahun 2020-2025	30
Grafik 8. Capaian Nilai Pengendalian Lingkungan Triwulan III	37
Grafik 9. Capaian Bulanan Nilai Pengendalian Lingkungan.....	37
Grafik 10. Perbandingan Capaian Indikator Nilai Pengendalian Lingkungan	37
Grafik 11. Rekapitulasi Capaian Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan (SKKP) Triwulan III	40
Grafik 12. Perbandingan Capaian Indikator Kapal Perikanan Izin Daerah Triwulan III	40
Grafik 13. Grafik Capaian Presentase Hasil Rekomendasi Pengawasan Triwulan III	53
Grafik 14. Perbandingan Capaian Presentase Hasil Rekomendasi Pengawasan Triwulan III	53
Grafik 15. Grafik Hasil Penyelenggaraan SKM Triwulan III	71
Grafik 16. Perbandingan Capaian SKM Triwulan III Tahun 2024 – 2025.....	72

EXECUTIVE SUMMARY

Birokrasi merupakan alat utama dalam penyelenggaraan Negara dan Pemerintahan karena berfungsi untuk menerjemahkan sebagai keputusan politik kedalam berbagai kebijakan publik serta untuk menjamin pelaksanaan kebijakan tersebut secara operasional, terutama untuk memberikan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, birokrasi menjadi faktor penentu keberhasilan keseluruhan agenda negara dan pemerintahan, dalam kerangka upaya merealisasi sebuah tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Secara umum capaian tata kelola pemerintahan yang baik seperti ditargetkan dalam Renstra 2025-2029, menunjukkan perkembangan yang baik, meskipun beberapa indikator masih memerlukan kerja keras dan perhatian tidak hanya dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap khususnya Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari, namun juga komitmen, keterlibatan seluruh pihak terkait dalam mewujudkan akuntabilitasnya. Secara kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari mendapatkan total Nilai Pengukuran Sasaran Strategis (NPSS) sebesar 110,7 sebagaimana *dashboard* di bawah ini:



Dari 5 sasaran Kegiatan ditetapkan berdasarkan Perjanjian Kinerja, sebanyak 4 sasaran yang terukur dinyatakan Istimewa dan 1 sasaran dinyatakan Baik.

Untuk mendukung capaian kinerja tahun 2025 telah dikeluarkan anggaran sebesar **Rp12.747.609.337** atau **24,87%** dari Pagu sebesar **Rp51.259.064.000**. Bagaimanapun juga sesuai dengan intruksi Presiden RI bahwa penyerapan Anggaran setiap instansi pemerintah harus lebih optimal, jika perlu harus mendekati angka 98 %, hal itu artinya bahwa anggaran yang mampu diserap pada akhirnya akan bergulir kepada masyarakat sehingga perekonomian secara nasional berkembang dengan baik dan mampu mensejahterakan masyarakat. Namun demikian, efisien

penggunaan anggaran tetap harus dikedepankan, khususnya efisiensi yang berasal dari pengadaan barang/jasa, dan penghematan lainnya yang dianggap perlu dengan tidak mengurangi efektifitas organisasi dalam melaksanakan pencapaian sasaran strategis masing – masing.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

1.2 TUGAS DAN FUNGSI

1.3 SDM PELABUHAN

1.4 PERMASALAHAN

1.5 SISTEMATIKA PENYAJIAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari merupakan salah satu unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pelayanan pemanfaatan sumber daya ikan, serta keselamatan operasional kapal perikanan. Guna mencapai tujuan pembangunan perikanan tangkap, Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari melaksanakan Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap, yang terdiri dari 3 (tiga) kegiatan, sebagai berikut :

1. Pengelolaan Pelabuhan Perikanan;
2. Pengelolaan Sumber Daya Ikan;
3. Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap.

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN menuju tercapainya pemerintahan yang bersih (*clean governance*) dan bertanggung jawab (*good governance*) diperlukan pertanggung jawaban dari penyelenggara negara yang dilaporkan pada akhir tahun anggaran dalam suatu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditindak lanjuti dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mengatur bahwa segala pelaksanaan pembangunan oleh instansi pemerintah agar dilaporkan secara akuntabel sesuai dengan perjanjian kinerja yang ditetapkan meliputi : pertanggung jawaban penggunaan anggaran, keberhasilan yang dihasilkan, kegagalan pelaksanaan serta permasalahan-permasalahan yang dihadapi yang disertai dengan tindak lanjut pelaksanaan di tahun mendatang. Tujuan dari pelaporan kinerja ini yakni : (1) untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya tercapai, (2) sebagai upaya

perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Wujud pelaporan kinerja dimaksud adalah Laporan Kinerja.

Berkaitan dengan hal tersebut, Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari Tahun 2025 disusun untuk mengukur pencapaian indikator kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari Tahun 2025 dalam mewujudkan misi dan tujuan yang telah ditetapkan. Laporan Kinerja ini adalah salah satu bentuk media pertanggung jawaban kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja dan anggaran yang telah dialokasikan terhadap kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan sehingga prinsip pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab (*good governance*) bisa diwujudkan.

1.2 TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap, unit pelaksana teknis pelabuhan perikanan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana program, dan anggaran, serta pelaporan di bidang pelabuhan perikanan;
2. Pelaksanaan pengaturan keberangkatan, kedatangan dan keberadaan kapal perikanan di Pelabuhan Perikanan;
3. Pelaksanaan pelayanan penerbitan Surat Tanda Bukti Laporan Kedatangan dan Keberangkatan Kapal Perikanan;
4. Pelaksanaan pemeriksaan *LogBook*;
5. Pelaksanaan pelayanan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar;
6. Pelaksanaan penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan;
7. Pelaksanaan pengawasan pengisian bahan bakar;
8. Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pendayagunaan dan pengawasan serta pengendalian sarana dan prasarana;
9. Pelaksanaan fasilitasi penyuluhan, pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan, perkarantina ikan, publikasi hasil penelitian, pemantauan wilayah pesisir, wisata bahari, pembinaan mutu serta pengolahan, pemasaran dan distribusi hasil perikanan;
10. Pelayanan jasa, pemanfaatan lahan dan fasilitas usaha;
11. Pelaksanaan pengumpulan data, informasi dan publikasi;

12. Pelaksanaan bimbingan teknis dan penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik;
13. Pelaksanaan inspeksi pengendalian mutu hasil perikanan pada kegiatan penangkapan ikan;
14. Pelaksanaan pengendalian lingkungan di pelabuhan perikanan;
15. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi pelabuhan perikanan tersebut, maka disusun struktur organisasi Pelabuhan Perikanan Samudera berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap, sebagai berikut:

1. Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, dan rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan.
2. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

Struktur organisasi Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap, maka struktur organisasi Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari adalah sebagai berikut :

Struktur Organisasi Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari



Gambar 1. Struktur Organisasi Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari Tahun 2025

1.3 SDM PELABUHAN

Berdasarkan UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah, diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian, disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan, serta digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pegawai ASN terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yaitu warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional.

Sedangkan Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yaitu warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

Adapun komposisi pegawai di Pelabuhan Perikanan Samudera Samudera Kendari berjumlah 120 orang yang terdiri 76 orang ASN, 19 orang PPNPN, dan 25 orang Jasa Lainnya Perorangan yang berasal dari berbagai bidang keahlian. Seluruh SDM di pelabuhan perikanan ini merupakan aset untuk mendukung pencapaian visi, misi dan sasaran strategis Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari yang telah ditetapkan.

Tabel 1. Komposisi ASN PPS Kendari Tahun 2025 Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Pendidikan								Jumlah
		S3	S2	S1	DIV	DIII	SLTA	SLTP	SD	
1	Laki-Laki		8	18	17	4	12			59
2	Perempuan		2	9	1		5			17
	Jumlah		10	26	24	4	16			76

1.4 PERMASALAHAN

Secara umum Perikanan tangkap memiliki permasalahan yang cukup kompleks karena terkait dengan banyak sektor dan juga sensitif terhadap interaksi terutama dengan aspek lingkungan. Ada berbagai isu yang muncul saat ini terkait dengan pengelolaan perikanan laut di Indonesia yang berpotensi mengancam kelestarian SDI dan lingkungan dan keberlanjutan mata pencaharian masyarakat di bidang perikanan. Praktek-praktek IUU Fishing yang terjadi baik oleh kapal-kapal perikanan Indonesia maupun oleh kapal-kapal perikanan asing yang menyebabkan kerugian dari berbagai aspek.

Kemampuan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di Indonesia masih lemah, untuk itu kapasitas dan kapabilitas petugas pengawasan harus terus ditingkatkan, sebagaimana yang diamanatkan dalam UU Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan.

Permasalahan dalam pembangunan perikanan tangkap mencakup berbagai kelemahan yang terdapat di internal sistem perikanan tangkap maupun berbagai ancaman yang berasal dari luar sistem perikanan tangkap di Indonesia. Permasalahan tersebut dapat dikelompokkan menjadi 5 (lima) permasalahan utama, yakni sebagai berikut:

- 1) Kapasitas Nelayan; Rendahnya kemampuan nelayan dalam menerapkan teknologi penangkapan ikan produktif dan efisien serta yang ramah lingkungan, dan rendahnya pengetahuan nelayan tentang cara penanganan ikan yang baik di atas kapal perikanan, karena itu PPS Kendari terus melakukan berbagai upaya dalam rangka peningkatan pengetahuan, keterampilan dan kesadaran pelaku utama terutama nelayan.
- 2) Kesejahteraan Nelayan; Belum terpenuhinya kebutuhan dasar keluarga nelayan serta rendahnya kemampuan nelayan dalam mengakses sumber

permodalan dan mengelola keuangan dalam menghadapi kerentanan usaha penangkapan ikan terhadap perubahan lingkungan dan cuaca.

- 3) Mindset Masyarakat Perikanan Tangkap; Usaha penangkapan ikan masih terbatas bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ataupun kebutuhan jangka menengah, belum sampai sepenuhnya pada upaya mendukung industrialisasi ataupun menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan
- 4) Sarana Prasarana Usaha Penangkapan Ikan; Belum optimalnya infrastruktur pelabuhan perikanan, konektivitas sistem informasi yang kurang, struktur armada kapal perikanan yang didominasi kapal kecil dengan jangkauan yang terbatas, minimnya armada kapal perikanan yang memenuhi laik tangkap dan laik simpan, kurangnya pendataan kapal dan alat penangkapan ikan yang *reliable*, minimnya penyerapan teknologi penangkapan ikan yang produktif dan efisien
- 5) Konektivitas Analisis dan Pemantauan Pemanfaatan Usaha; Belum jelasnya mekanisme pendataan nelayan kecil, serta belum optimalnya integrasi perizinan usaha antara pusat-daerah, dan kurangnya intensifikasi penggunaan sistem IT.

Sedangkan tantangan dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan, diantaranya adalah (1) Optimalisasi kelembagaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP), (2) Harmonisasi tata ruang laut dan darat untuk penguatan penyelarasan antara RTRW dengan RZWP3K dan Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional/Tertentu (RZ KSN/KSNT), (3) Masih terjadinya praktek IUU *fishing* dan *destructive fishing*, dan (4) Sinergi stakeholders dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan.

Dalam rangka pengembangan usaha, permasalahan utama yang dihadapi saat ini adalah masih adanya keterbatasan dukungan permodalan usaha dari pihak perbankan dan lembaga keuangan lainnya kepada para nelayan. Dalam kondisi ini nelayan terkendala dengan pemenuhan persyaratan prosedural perbankan yang dianggap cukup rumit dan panjang.

Kondisi kesejahteraan pada nelayan dan pelaku usaha untuk dapat memenuhi kebutuhan dengan pendapatan yang diperolehnya masih sangat terbatas.

Permasalahan yang dihadapi dalam menghadapi MEA 2015 utamanya adalah belum adanya perlindungan terhadap pelaku usaha UMK untuk meningkatkan daya saing melalui sinergi lintas sektor termasuk dalam mengakses pembiayaan, perlindungan terhadap pasar domestik dan sertifikasi produk.

Dalam menetapkan rencana strategis 5 (lima) tahun ke depan 2025-2029, Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari melakukan analisis dalam memetakan lingkungan strategis organisasi dengan teknik analisis kekuatan (*strength*) - kelemahan (*weakness*) - peluang (*opportunities*) - hambatan (*threats*) atau SWOT Analisis sebagai jembatan yang menghubungkan antara tujuan dan sasaran pembangunan Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari yang telah ditetapkan dengan strategi, kebijakan dan program pembangunan yang akan ditempuh maka perlu diawali dengan analisis lingkungan strategis yang senantiasa berkembang dinamis. Analisis dimaksud mencakup analisis lingkungan internal dan eksternal, dimana masing-masing analisis ditinjau dari tiga aspek utama, yakni sosial, ekonomi dan ekologi.

• **Faktor Internal**

a. Kekuatan (*Strength*)

Dengan memperhatikan *stakeholders* dalam rangka mempertahankan eksistensi dan kemampuan bersaing, Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari memiliki kekuatan yang dijabarkan sebagai berikut :

- 1) Lokasi PPS Kendari yang langsung menghadap Laut Banda adalah merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP-714 dan 715) dengan beberapa keanekaragaman sumberdaya ikan dan mempunyai nilai ekonomis tinggi yang masih potensial untuk dikembangkan pengelolaannya.
- 2) Tersedianya sarana dan prasarana yang terus dikembangkan dan disempurnakan sesuai dengan master plan.
- 3) Tersedianya data statistik dan Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan yang dapat mendukung pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan secara bertanggungjawab.
- 4) Tersedia dan telah operasionalnya prasarana pelayanan terpadu di kawasan PPS Kendari.
- 5) Pelayanan Publik berstandar ISO 9001 : 2008

b. Kelemahan

Disamping kekuatan yang dimiliki, analisis terhadap lingkungan internal juga memperhatikan unsur-unsur kelemahan yang harus dipertimbangkan antara lain :

- 1) Kemampuan manajemen maupun teknis SDM yang masih kurang memadai.
- 2) Penurunan kapasitas fasilitas pokok pelabuhan terutama pendangkalan kolam pelabuhan
- 3) Terbatasnya biaya operasional dan pemeliharaan fasilitas prasarana pelabuhan.
- 4) Masih kurangnya pengetahuan dan kesadaran serta keterampilan nelayan dalam penanganan ikan hasil tangkapan

• Faktor Eksternal

a. Peluang

Adapun peluang yang dapat dimanfaatkan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan dan pengembangan perikanan tangkap sesuai visi dan misi Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari adalah sebagai berikut:

- 1) Tumbuh dan berkembangnya iklim usaha sejalan dengan kebijakan pemerintah daerah yang mendorong peningkatan investasi di wilayah Kota Kendari.
- 2) Dukungan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
- 3) Semakin meningkatnya pangsa pasar produk perikanan baik lokal maupun nasional, seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, tingkat pendidikan dan kesadaran masyarakat yang semakin meningkat untuk mengkonsumsi produk pangan yang bergizi dan menyehatkan.
- 4) Aksesibilitas distribusi hasil perikanan.

b. Ancaman/Tantangan

Adapun beberapa ancaman/tantangan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- 1) Kurangnya komitmen instansi terkait dalam penerapan regulasi perikanan.
- 2) Maraknya pembangunan industri diluar Kawasan sehingga mengancam eksistensi industri dalam kawasan.
- 3) Pendaratan ikan belum mampu memenuhi kapasitas pengolahan ikan yang ada dalam Kawasan.
- 4) Masih rendahnya kemampuan masyarakat menyerap informasi yang ada di Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan.

- 5) Rendahnya kualitas sumberdaya manusia perikanan khususnya nelayan yang bisa dilihat dari rendahnya tingkat pendidikannya menyebabkan proses alih teknologi dan ketrampilan tidak sesuai dengan yang diharapkan, sehingga berdampak pada kemampuan pengembangan usaha.
- 6) Masih rendahnya mutu hasil perikanan yang menyebabkan nilai jual produk perikanan menjadi rendah.

Berdasarkan pengamatan terhadap kondisi internal dan eksternal, maka dapat diketahui unsur-unsur kekuatan (strength), kelemahan (weakness) peluang (opportunities) dan ancaman (threats). Keempat unsur tersebut harus dapat dianalisa untuk menentukan strategi yang tepat dalam rangka pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan.

1.5 SISTEMATIKA PENYAJIAN

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2025 merupakan wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi suatu unit organisasi yang transparan, dan sebagai alat kendali serta pemacu peningkatan kinerja selama kurun waktu 1 tahun yaitu pada tahun 2025. Adapun kaitan dari sistematika penyajian Laporan Kinerja (Lkj) Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari tahun 2025 sebagai berikut

1. Ikhtisar Eksekutif / *Executive Summary*

Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya. Disebutkan juga langkah-langkah atau upaya apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

2. Bab I Pendahuluan

Pada bagian ini disajikan informasi umum tentang Laporan Kinerja yang menjadi tanggungjawab sebuah instansi pemerintah, penjelasan secara umum suatu organisasi serta bagan organisasi dan informasi tentang alur capaian kinerja yang meliputi dari perencanaan, pengukuran kinerja, pelaporan, evaluasi kinerja dan capaian kinerja selama waktu tertentu (waktu pelaporan).

3. Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai visi, misi dan rencana hasil yang akan dicapai (tujuan dan sasaran strategis, indikator kinerja dan targetnya) dalam rencana jangka menengah (RPJM/Renstra), rencana kinerja tahunan (RKT/Renja) dan penetapan kinerja (PK) pada periode tahun yang tertentu (tahun pelaporan).

4. Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini memuat uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi kinerja, dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Selain itu, disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tupoksi atau tugas - tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran/tujuan organisasi yang telah ditetapkan serta langkah-langkah peningkatan dan efisiensi.

5. Bab IV Penutup

Pada bagian ini dikemukakan kesimpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan pencapaian sasaran strategis serta strategi pemecahan masalah.

6. Lampiran

Isi dari pada lampiran merupakan kumpulan dari Penetapan Kinerja, Pengukuran Kinerja yang telah ditanda tangani oleh Kepala Pelabuhan Perikanan samudera Kendari dan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025– 2029

2.2 TUJUAN DAN SASARAN KEGIATAN

2.3 INDIKATOR KINERJA TAHUN 2025

2.4 RENCANA AKSI

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025 - 2029

RPJMN Tahun 2025-2029 merupakan integrasi antara kebijakan RPJPN Tahun 2025-2045 dengan visi, misi, dan program Presiden yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029. Pembangunan jangka panjang tahun 2025-20245 merupakan tahapan pembangunan yang berkesinambungan dimana tahun 2025-2029 merupakan tahap pertama penguatan transformasi. Untuk itu di dalam 2025-2029 diuraikan berbagai upaya transformatif sesuai dengan fokus arah kebijakan dalam tahap pertama RPJPN Tahun 2025-2045 yaitu Transformasi Sosial, Transformasi Ekonomi, Transformasi Tata Kelola, Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia, Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi, Pembangunan Wilayah dan Sarana Prasarana dan Kesiambungan Pembangunan.

Arah kebijakan pembangunan nasional tahun 2025-2029 merupakan penggabungan antara Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih serta Arah Kebijakan RPJPN Tahun 2025-2045 Tahap I. RPJMN tahun 2025-2029 menetapkan delapan Prioritas Nasional sebagai arah kebijakan pembangunan jangka menengah yang merupakan wujud implementasi langsung Asta Cita. Prioritas Nasional tersebut dijadikan pedoman dalam penyusunan arah kebijakan dan pelaksanaan strategi Rencana Strategis KKP 2025-2029. KKP berkontribusi dalam pencapaian indikator sasaran kegiatan prioritas dalam RPJMN 2025-2029 yang dijabarkan sebagai berikut:

Fokus Arah Kebijakan RPJPN Tahun 2025–2045 Tahap I



Transformasi Sosial

- Penuntasan pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial
- Peningkatan kualitas SDM untuk membentuk manusia produktif



Transformasi Ekonomi

- Melanjutkan proses hilirisasi sumber daya alam unggulan
- Peningkatan kapasitas riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja
- Penerapan ekonomi hijau, termasuk pelaksanaan transisi energi tahap pertama
- Pemenuhan akses digital di seluruh wilayah Indonesia
- Pembangunan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan utamanya di luar pulau Jawa



Transformasi Tata Kelola

- Perbaikan kelembagaan yang tepat fungsi
- Penyempurnaan fondasi penataan regulasi
- Pembentukan dan penguatan lembaga tunggal pengelola regulasi
- Peningkatan kualitas ASN berbasis merit
- Kebijakan pembangunan berbasis bukti
- Penerapan manajemen risiko perencanaan dan pengendalian pembangunan
- Peningkatan pelayanan public berbasis teknologi informasi
- Penguatan kapasitas masyarakat sipil



Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepimpinan Indonesia

- Pembaharuan substansi hukum
- Pengembangan budaya hukum dan transformasi kelembagaan hukum yang mengedepankan keseimbangan antara kepastian, keadilan, kemanfaatan, dan perdamaian berlandaskan Pancasila
- Transformasi tata kelola keamanan dalam negeri, keamanan laut, keamanan dan ketertiban masyarakat, keamanan insani dan keamanan siber sebagai pilar-pilar keamanan nasional
- Lembaga demokrasi yang kuat, akuntabel berbasis digital, parlemen modern, parpol yang berbasis nilai
- Menjaga stabilitas harga yang dapat menjaga daya beli masyarakat dan kepercayaan investor, serta menjaga keberlanjutan fiskal yang adaptif
- Penguatan infrastruktur diplomasi dan kelembagaan
- Mengonsolidasikan kebijakan dan langkah-langkah untuk memperkuat sinergi diplomasi
- Pembangunan kekuatan pertahanan berorientasi kepulauan dan maritim yang didukung industri pertahanan yang sehat, kuat, dan mandiri



Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

- Optimalisasi nilai agama dan budaya serta peran keluarga dalam pembangunan karakter manusia dan menggerakkan modal sosial dalam masyarakat
- Peningkatan ketangguhan manusia dan masyarakat dalam menghadapi berbagai perubahan dan bencana
- Penguatan riset, inovasi, dan teknologi dalam meningkatkan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup
- Pengembangan kapasitas kelembagaan dan instrumen kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, termasuk untuk energi baru terbarukan
- Penguatan standarisasi dan regulasi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup
- Akselerasi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dan penurunan emisi GRK



Pembangunan Wilayah dan Sarana Prasarana

- Peningkatan pembangunan wilayah potensi ekonomi tinggi, utamanya melalui optimalisasi pemanfaatan infrastruktur yang ada, termasuk pemanfaatan potensi ketersediaan energi
- Pembangunan *island grid* (dimulai di Sumatera) dan *national grid* (dimulai antara Sumatera-Jawa)
- Percepatan pembangunan konektivitas laut sebagai *backbone* logistik domestik yang dilengkapi dengan konektivitas udara, darat, dan digital
- Melanjutkan pengembangan wilayah metropolitan dan kota besar serta melanjutkan pembangunan dan penyiapan 6 (enam) klaster ekonomi Ibu Kota Nusantara (IKN)
- Penuntasan pemenuhan pelayanan dasar berkualitas (pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar termasuk listrik dengan *micro grid*)



Kesinambungan Pembangunan

- Reformasi tata kelola fiskal
- Mobilisasi dan optimalisasi pembiayaan pembangunan non-pemerintah

Gambar 2. Fokus Arah Kebijakan RPJPN Tahun 2025–2045 Tahap I

Sejalan dengan RPJMN 2025-2029, arah kebijakan dan pembangunan kelautan dan perikanan didasari oleh perubahan *mindset* bahwa pembangunan ekonomi biru sebagai sumber pertumbuhan baru harus dilakukan secara terukur dengan mempertimbangkan keberlanjutan sumber daya dengan melindungi laut dan sumber dayanya, mengurangi tekanan dan aktivitas perikanan yang tidak ramah lingkungan serta menjaga kelestarian ekosistem perairan sebagai rumah bagi kekayaan keanekaragaman hayati yang dimiliki. Terdapat empat aspek yang melandasi kerangka pikir pembangunan ekonomi biru, yaitu:

1. Sektor Kelautan dan Perikanan sebagai Main System Pembangunan Nasional

Untuk mewujudkan sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu sektor yang didorong untuk menciptakan sumber pertumbuhan baru bagi pertumbuhan ekonomi nasional maka sektor kelautan dan perikanan harus menjadi *leading sector* yang harus mendapatkan sokongan oleh sektor lainnya dalam setiap konteks pembangunan nasional.

2. Ekologi Sebagai Panglima

Pembangunan kelautan dan perikanan memprioritaskan pada perlindungan laut untuk memberikan ruang hidup bagi sumber daya hayati yang ada di laut, pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai sumber pangan serta memberi manfaat ekonomi secara berkelanjutan. Laut merupakan episentrum serapan karbon dunia yang berkontribusi pada keberlangsungan hidup manusia dan pencegahan perubahan iklim dan gas rumah kaca. Potensi kelautan dan perikanan yang dimiliki harus dioptimalkan secara berkelanjutan sehingga menjadi *champion* di pasar global.

3. Market Driven Oriented

Pembangunan kelautan dan perikanan harus dapat mudah beradaptasi terhadap tuntutan pasar domestik dan global sehingga daya saing kompetitif dan komparatif harus terus ditingkatkan.

4. Pendekatan Teknologi

Pendekatan teknologi dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, mengakses informasi secara akurat dan *real-time*, serta mendorong pertumbuhan usaha kelautan dan perikanan. Oleh karena itu, upaya yang perlu dilakukan antara lain: pemanfaatan teknologi informasi dan digitalisasi, pemanfaatan teknologi satelit, serta teknologi lainnya yang dapat meningkatkan produktivitas.

Selain itu, pembangunan kelautan dan perikanan memperhatikan 4 prinsip pembangunan yaitu; 1) **Tematik**, mempertimbangkan keunggulan komparatif suatu wilayah; 2) **Holistik**, mengintegrasikan hulu-hilir industri kelautan dan perikanan; 3) **Integratif**, sinergi dan integrasi antara program dan anggaran lintas sektor; dan 4) **Spasial**, pengembangan kawasan berbasis daya dukung secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan 3 aspek keberlanjutan yaitu; sosial, lingkungan, dan ekonomi.



Gambar 3. Kebijakan Pembangunan Ekonomi Biru

Maka, arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2025-2029 adalah: 1) Memperluas Kawasan Konservasi Laut; 2) Penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota; 3) Pengembangan Perikanan Budi Daya di Laut, Pesisir, dan Darat yang Berkelanjutan; 4) Pengawasan dan Pengendalian Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; 5) Pembersihan Sampah Plastik di Laut melalui Gerakan Partisipasi Nelayan.

Dalam upaya mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang lebih baik, pemerintah telah mengidentifikasi lima arah kebijakan pengarusutamaan yang bersifat inovatif dan adaptif. Kelima arah kebijakan ini saling terkait dan bertujuan untuk menciptakan sektor kelautan dan perikanan yang lebih sejahtera, berkeadilan, dan berkelanjutan serta menjadi landasan pembangunan kelautan dan perikanan yang lebih inklusif, efisien, dan berkelanjutan. Dengan mengintegrasikan berbagai aspek pembangunan, diharapkan dapat tercipta keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2.2 TUJUAN DAN SASARAN KEGIATAN

Berdasarkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2025 – 2029, tujuan dari Pembangunan Kelautan dan Perikanan yang tertuang dalam Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2025 – 2029 meliputi:

1. Meningkatnya efektivitas pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
2. Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan secara berkelanjutan serta pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang berdaya saing;
3. Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia kelautan dan perikanan, dan
4. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berkualitas.

Dalam mencapai tujuan di atas, Kementerian Kelautan dan Perikanan menetapkan beberapa sasaran strategis yang kemudian dilakukan penjenjangan hingga ke Unit Pelaksana Teknis (UPT) dalam hal ini adalah Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari. Adapun sasaran strategis yang telah ditetapkan di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari yaitu:

1. Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari, dengan indikator kinerja:
 - a. Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Rp Juta)
2. Produktivitas Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari Meningkat, dengan indikator kinerja:
 - a. Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Ton).
3. Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari yang Optimal dan Bertanggung Jawab, dengan indikator kinerja:
 - a. Persentase Permohonan Pengusahaan yang Dianalisis/dan atau Dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Persen);
 - b. Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Nilai);
 - c. Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Persen);
 - d. Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Persen);
 - e. Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Nilai).
4. Pengelolaan Awak Kapal Perikanan, Kapal Perikanan, dan Alat Penangkapan Ikan yang Berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari, dengan indikator kinerja:
 - a. Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan (Kapal);
 - b. Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan (Nilai).

5. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari, dengan indikator kinerja:
 - a. Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan (nilai);
 - b. Presentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Persen);
 - c. Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Nilai);
 - d. Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (indeks);
 - e. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Persen);
 - f. Persentase Pengelolaan BMN di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Persen);
 - g. Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Nilai);
 - h. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Nilai);
 - i. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Indeks);

2.3 INDIKATOR KINERJA TAHUN 2025

Untuk mengukur realisasi dan rencana strategis, Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari menetapkan indikator kinerja dan target untuk masing-masing sasaran yang harus dicapai sehingga lebih terarah dan terkendali. Target ini dituangkan dalam perjanjian kinerja. Hal ini ditetapkan untuk setiap indikator kinerja baik untuk indikator kinerja tingkat sasaran maupun indikator kinerja tingkat kegiatan yang merupakan penjabaran dari program-program yang telah disusun sebelumnya. Adapun indikator kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2. Indikator Kinerja Tahun 2025 Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET	PJ
1	Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari	1	Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Rp. Juta)	7,241.04	Tim Kerja Pelayanan Usaha
2	Produktivitas Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari Meningkat	2	Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Ton)	16.000	Tim Kerja Operasional
3	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari yang Optimal dan Bertanggung Jawab	3	Persentase Permohonan Pengusahaan yang Dianalisa dan/atau Dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Persen)	100	Tim Kerja Tata Kelola Sarana dan Prasarana
		4	Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Nilai)	87	Tim Kerja Operasional
		5	Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Persen)	85	Tim Kerja Kesyahbandaran
		6	Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Persen)	80	Tim Kerja Tata Kelola Sarana dan Prasarana
		7	Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Nilai)	30,10	Tim Kerja Tata Kelola Sarana dan Prasarana
4	Pengelolaan Awak Kapal Perikanan, Kapal Perikanan, dan Alat Penangkapan Ikan yang Berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari	8	Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan (Kapal)	2333	Tim Kerja Kesyahbandaran
		9	Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan (Nilai)	0,26	Tim Kerja Kesyahbandaran
5	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di Lingkungan	10	Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Nilai)	75,5	Tim Kerja Dukungan Manajerial

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PJ
	Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari	11 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Persen)	85	Tim Kerja Dukungan Manajerial
		12 Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Nilai)	88	Tim Kerja Dukungan Manajerial
		13 Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Indeks)	87	Tim Kerja Dukungan Manajerial
		14 Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Persen)	76	Tim Kerja Dukungan Manajerial

Dalam mencapai sasaran kegiatan tahun 2025 Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai wujud Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap dengan anggaran sebesar Rp. **51.259.064.000** Pagu tersebut dilaksanakan untuk melaksanakan 3 (tiga) kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3. Komposisi Anggaran Berdasarkan Jenis Kegiatan Tahun 2025

No	KEGIATAN	PAGU
1	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan;	32.263.573.000
2	Pengelolaan Sumber Daya Ikan;	34.010.000
3	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap.	18.961.481.000
TOTAL		51.259.064.000

2.4 RENCANA AKSI

Rencana aksi merupakan penjabaran lebih lanjut dari target – target yang telah disusun dan ditetapkan pada dokumen. Dokumen rencana aksi digunakan

sebagai alat monitor secara berkala (triwulanan) terhadap pencapaian indikator output dan mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi sehingga dapat dilakukan upaya – upaya tindak lanjut guna mengeliminir permasalahan pada triwulan berikutnya. Rencana aksi disusun hanya untuk menjabarkan IKU pada perspektif internal proses dan learning and growth sebagaimana pada Tabel berikut ini:

Tabel 4. Rencana Aksi Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Unit PJ	Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Target Kegiatan	Satuan Target Kegiatan	Target											
							Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agus t	Sep	Okt	Nov	Des
1. Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari	1. Penerimaan PNBP Non-SDA di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari	Tim Kerja Pelayanan Usaha	Pemeliharaan untuk menunjang optimalisasi PNBP	398,074,000	12	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2. Produktivitas perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari meningkat	2. Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari	Tim Kerja Operasional Pelabuhan	Layanan Data Statistik Kelautan dan Perikanan	18,000,000	12	Laporan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			Operasional Mutu dan Inspeksi Pembongkaran Ikan	37,300,000	12	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			Operasional Sekretariat Lembaga Pengelolaan WPPNRI	5,220,000	1	Kegiatan						1						
			Operasional Unit Pengelola Perikanan LPP WPPNRI 734 mendukung Perikanan Terukur di Zona E3	63,480,000	1	Kegiatan						1						
3. Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari yang Bersifat Saling	3. Persentase Perumahan Pengusahan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari	Tim Kerja Pelayanan Usaha	Sosialisasi Pengguna jasa dalam rangka PPT terkait Pengusahan PBA dan Retribusi Daerah	33,080,000	1	Kegiatan									1			
			Pelayanan Pengusahan Pelabuhan Perikanan (PP, Untia)	46,130,000	12	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	4. Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari	Tim Kerja Operasional Pelabuhan	Pengelolaan dan Operasional Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan	15,800,000	12	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			Publikasi/Promosi Pelabuhan Perikanan	131,500,000	2	Dokumen						1						1
			Evaluasi data PIPP dalam Rangka Mendukung Kebijakan PPT	101,240,000	12	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			Peningkatan pelaksanaan kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan	217,024,000	12	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	5. Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari	Tim Kerja Kesyahbandaran	Layanan kesyahbandaran di Pelabuhan Binaan (PP, Untia)	194,960,000	12	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			Layanan kesyahbandaran di Pelabuhan Binaan (Wamro)	39,700,000	12	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			Layanan kesyahbandaran di Pelabuhan Binaan (Lagap)	30,200,000	12	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			Layanan kesyahbandaran di Pelabuhan Binaan (Mangole)	10,800,000	12	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			Layanan kesyahbandaran di Pelabuhan Binaan (Bonto Bahari)	28,200,000	12	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			Layanan kesyahbandaran di Pelabuhan Binaan (Lonsre)	38,200,000	12	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kesyahbandaran dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan PNBP Pasca Produk (PPS Kodan)	618,940,000	1	Kegiatan						1						
			Sosialisasi Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan Binaan (Lagap)	13,970,000	1	Kegiatan					1							
			Operasional syahbandar di 4 lokasi Pelabuhan Perikanan Binaan Untia	20,600,000	3	Dokumen					1	1	1					

Rencana Aksi Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari Tahun 2024

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Unit PJ	Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Target Kegiatan	Satuan Target Kegiatan	Target											
							Jan	Feb	Maret	April	Mei	Jun	Juli	Agus t	Sep	Okt	Nov	Des
Pengembangan dan peningkatan fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari yang optimal	6. Peningkatan Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari	Tim Kerja Tata Kelola dan Sarana Prasarana	Sosialisasi Pelaksanaan PNBP Rangka Mendukung Pelaksanaan Penangkapan Ikan Terukur (PTT)	41.260.000	1	Kegiatan			1									
			Sosialisasi Pelaksanaan PNBP Rangka Mendukung Pelaksanaan Penangkapan Ikan Terukur (PTT) (PP, Umida)	235.510.000	1	Kegiatan					1							
			Sosialisasi Keselamatan Pelayaran bagi Nelayan	22.730.000	1	Kegiatan				1								
			Sosialisasi Keselamatan Pelayaran bagi Nelayan (Mangrove)	37.500.000	1	Kegiatan					1							
			Sosialisasi Keselamatan Pelayaran bagi Nelayan (Lampiran)	45.560.000	1	Kegiatan				1								
			Desiminasi Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) dan Penerapan Lembar Awal di PPS Kendari	25.000.000	1	Kegiatan					1							
			Desiminasi Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) dan Penerapan Lembar Awal di Pelabuhan Binawa (Wiyamsi)	31.960.000	1	Kegiatan					1							
			Dukungan Pelaksanaan Proyek Eco Fishing Port (Lender ATU) di PPS Kendari	150.000.000	1	Kegiatan												1
			Project Implementing Unit di PPS Kendari (Kesejahteraan Pelaksanaan Proyek di PIU)	198.000.000	1	Kegiatan												1
			Pengadaan Peralatan untuk Menunjang Optimalisasi PPS	310.510.000	6	Dokumen			1			1	1		1	1	1	
			Pemeliharaan Fasilitas pelabuhan	45.000.000	3	Dokumen		1				1				1		
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin untuk Menunjang Operasional Pelabuhan	74.800.000	2	Dokumen			1						1			
			Penerapan aplikasi Seterakan	18.268.000	12	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			Pelaksanaan RPU/RIK dalam rangka pengendalian kontaminasi lingkungan	61.604.000	4	Kegiatan			1			1			1			1
			Pelaksanaan ES di Pelabuhan Perikanan	165.857.000	12	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang Bersifat Selang di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari	8. Kapal Perikanan Irit Daerah yang Memenuhi Ketentuan	Tim Kerja Kesejahteraan	Pelaksanaan Pengawasan Terpadu PTT di PP, Umida	48.800.000	12	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			Audit Internal ISO 14001	34.510.000	1	Kegiatan					1							
			Sosialisasi Pemeriksaan Kelengkapan/ Pengukuran/ Pengujian/ Inspeksi/ Kapal Perikanan	50.000.000	70	Produk			20			20			20			10
Pengelolaan Awak Kapal Perikanan yang Tersertifikasi/terdaftar di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari	9. Peningkatan Peningkatan Peningkatan Kompetensi dan Peningkatan Nelayan/Awak Kapal Perikanan	Tim Kerja Operasional Pelabuhan	Sosialisasi e-logbook Penangkapan Ikan	44.442.000	1	Kegiatan												1
			Bimbingan Teknis untuk Peningkatan Kompetensi Awak Kapal Perikanan/ Nelayan	13.000.000	33	Orang			33									
			Usaha Pelayanan melalui Pusat Pendanaan	8.000.000	48	Orang												48

Rencana Aksi Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari Tahun 2024

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Unit PJ	Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Target Kegiatan	Satuan Target Kegiatan	Target											
							Jan	Feb	Maret	April	Mei	Jun	Juli	Agus t	Sep	Okt	Nov	Des
Tata kelola Pemerintahan yang baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari	10. Nilai penilaian mandiri pembangunan zona integrasi Pelabuhan Perikanan	Tim Kerja Dukungan Manajerial	Sosialisasi SOPB di Kendari	11.760.000	1	Kegiatan					1							
			Forum Konsultasi Publik dan Pembentukan Pembangunan Zona Integrasi	34.000.000	1	Kegiatan								1				
	11. Penertarikan hasil rekomendasi pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari	Tim Kerja Dukungan Manajerial			1	Kegiatan								1				
	12. Nilai rekrutasi kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari	Tim Kerja Dukungan Manajerial	Pemrosesan dokumen perencanaan dan penganggaran	75.000.000	4	Dokumen			1			1			1			1
			Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran	39.000.000	4	Dokumen			1			1			1			1
	13. IP ASN di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari	Tim Kerja Dukungan Manajerial	Pengembangan, Pengelolaan dan Pembinaan Jabatan Fungsional	55.000.000	1	Laporan												1
			Fasilitasi Pelabuhan Perikanan	72.000.000	1	Kegiatan												1
	14. Tingkat kepuasan pengunjung barang/jasa Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari	Tim Kerja Dukungan Manajerial	Sarana Pendukung Pengolah Data	506.567.000	1	Dokumen			1			1			1			
			Sarana Pendukung Kegiatan Administrasi Perikanan	61.700.000	3	Dokumen			1			1			1			
			Sarana Pendukung Fasilitas Pelabuhan	1.038.526.000	4	Dokumen			1			1			1			1
	15. Tingkat kepuasan pengunjung BMTN Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari	Tim Kerja Dukungan Manajerial	Pelaporan Rancangan Lingkup Cipta Perikanan Tangkap	154.580.000	1	Layanan												1
	16. Nilai BPA Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari	Tim Kerja Dukungan Manajerial	Gaji dan Tunjangan	10.092.476.000	12	Laporan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	17. Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari	Tim Kerja Dukungan Manajerial	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	7.800.000	12	Laporan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	18. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari	Tim Kerja Dukungan Manajerial	Sosialisasi Hasil Survei Kepuasan Pelanggan dan KPI	12.094.000	1	Kegiatan				1								

Kendari, 10 Januari 2024
Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari,

Syahril Abd. Raup, S.T., M.Si
NIP. 25760522 200502 1 002

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

3.2 REALISASI ANGGARAN



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan perikanan tangkap tahun 2025 diukur melalui 18 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terbagi ke dalam 5 (lima) Sasaran Strategis yakni sebagai berikut:

1. Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari, dengan indikator kinerja sebanyak 1 indikator;
2. Produktivitas Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari, dengan indikator kinerja sebanyak 1 indikator;
3. Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari yang Optimal dan Bertanggung Jawab, dengan indikator kinerja sebanyak 5 indikator;
4. Pengelolaan Awak Kapal Perikanan, Kapal Perikanan, dan Alat Penangkapan Ikan yang Berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari, dengan indikator kinerja sebanyak 2 indikator;
5. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari, dengan indikator kinerja sebanyak 8 indikator.

Pencapaian Indikator Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari pada Triwulan III tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari Triwulan III Tahun 2025

				TRIWULAN III			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	TARGET	REALISASI	%	
1.	Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari	01	Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Rp.Juta)	7.241,04	5.300	4.865,43	91,80
2.	Produktivitas Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari Meningkat	02.	Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan	16.000	10.000	11.107,51	111,08

SASARAN KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	TRIWULAN III		
					TARGET	REALISASI	%
			Samudera Kendari (Ton)				
3.	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari yang Optimal dan Bertanggung Jawab	04.	Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Nilai)	87	87	97,67	112,26
		07.	Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Nilai)	30,10	30,10	83,48	120
4.	Pengelolaan Awak Kapal Perikanan, Kapal Perikanan, dan Alat Penangkapan Ikan yang Berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari	08.	Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan (Kapal)	2330	2323	3262	120
5.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari	11.	Presentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Persen)	85	85	100	117,65
		14.	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Persen)	76	76	100	120
		18.	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan	88,50	88,50	95,71	108,15

SASARAN KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	TRIWULAN III		
					TARGET	REALISASI	%
			Samudera Kendari (Indeks)				

Berdasarkan tabel di atas, nilai kinerja organisasi (NKO) PPS Kendari pada Triwulan III adalah 110,70, dengan 6 IKU & IKM yang bernilai Istimewa (nilai di atas 110) dan 2 IKU & IKM yang bernilai Baik (nilai 90- <110). Pembahasan masing-masing indikator akan dicantumkan pada sub bab berikut sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 dan Permen KP Nomor 35/PERMEN-KP/2023 untuk laporan kinerja interim, sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja triwulan berjalan;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja triwulan berjalan dengan triwulan tahun sebelumnya atau triwulan sebelumnya (jika ada);
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan triwulan berjalan dengan target tahunan;
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan; dan
5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

3.2. EVALUASI DAN ANALISA PENCAPAIAN KINERJA

Adapun hasil evaluasi dan analisa pencapaian kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari adalah sebagai berikut:

3.2.1. Sasaran Kegiatan 1 – Nilai PNPB Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari

Pencapaian sasaran kegiatan ini diukur melalui 1 (satu) Indikator yakni; Nilai PNPB non SDA Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Rp. Juta)

Indikator Kinerja (IK-1) : Penerimaan PNBP non SDA di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari

Indikator Nilai PNBP non SDA dari sektor Perikanan Tangkap adalah seluruh penerimaan Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari berasal dari penerimaan operasional Pelabuhan. Peningkatan PNBP dari sektor perikanan diantaranya ditentukan dari arah operasional pelabuhan perikanan samudera kendari. PNBP yang dikelola oleh PPS Kendari berupa PNBP yang berasal dari Pendapatan jasa pelabuhan, Penggunaan sarana dan prasarana, Jasa lainnya.

Target nilai PNBP non SDA pada tahun 2025 adalah sebesar Rp7.241.040.000 dengan periode pengukuran triwulanan. Adapun realisasi target PNPB Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari tersaji pada tabel berikut:

Tabel 6. Capaian Indikator Kinerja "Penerimaan PNBP non SDA di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari" Triwulan III Tahun 2025

Sasaran Kegiatan – 1					Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari				
Indikator Kinerja – 1					Penerimaan PNBP non SDA di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari				
Realisasi Triwulan III Tahun 2020 – 2024					Realisasi Tahun 2025				
Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Target Tahun 2025	Target TW III	Realisasi TW III	% Realisasi thd Target TW III 2025	% Realiasi thd Target Tahun 2025
3.094	3.54	5.26	6.481,51	5.654,71	7.241,04	5.300	4.865,43	91.80	67.19

1) Perbandingan Target dengan Realisasi Triwulan III Tahun 2025

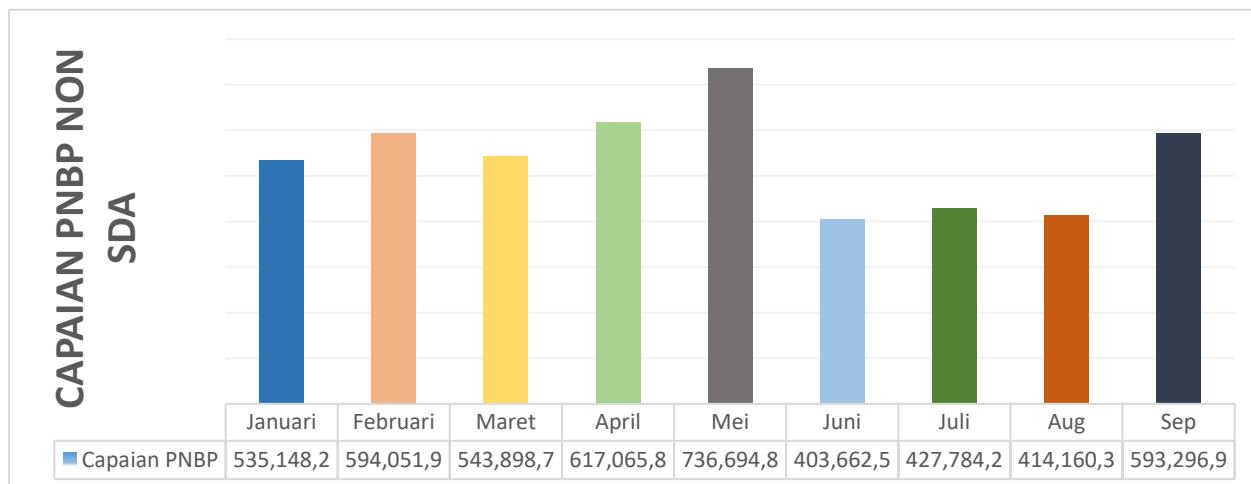
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa capaian target sebesar Rp4.865.432.672 atau 91,80% dari target. Adapun laporan target & realisasi PNBP per akun yang bersumber dari data TPNBP – SPAN – dan SIMPONI adalah sebagai berikut:

Tabel 7. Laporan Target & Realisasi PNBP Per Akun Triwulan III Tahun 2025

No	Akun	Target Sumber Data TPNBP (Rp)	Realisasi – Sumber Data SPAN (Rp)	Realisasi – Sumber Data Simponi (Rp)
1.	425122 – Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0,00	23.473.199,00	0,00

No	Akun	Target Sumber Data TPNBP (Rp)	Realisasi – Sumber Data SPAN (Rp)	Realisasi – Sumber Data Simponi (Rp)
2.	425131 – Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	16.456.000,00	767.054.792,00	0,00
3.	425151 – Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	2.356.277.000,00	606.115.248,00	0,00
4.	425621 – Pendapatan Jasa Pelabuhan Perikanan	4.868.307.000,00	3.466.931.265,00	0,00
5.	425911 – Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu	0,00	1.858.168,00	0,00
TOTAL		7.241.040.000	3.430.542.272,00	3.421.176.948,00

Apabila dilihat capaian PNPB per bulannya, capaian tertinggi didapatkan pada bulan September yaitu sebesar Rp593.296.939 dimana kenaikan signifikan diperoleh dari penerimaan umum yaitu sewa lahan dan bangunan dengan tarif PP.28 tahun 2020 yaitu sebesar Rp111.061.563 dimana pada bulan Agustus tidak ada penerimaan dan bulan Juli hanya mencatatkan angka penerimaan Rp21.153.150. Selain itu, terdapat pendapatan yang juga meningkat pada penerimaan pas masuk dan penerimaan jasa Listrik.

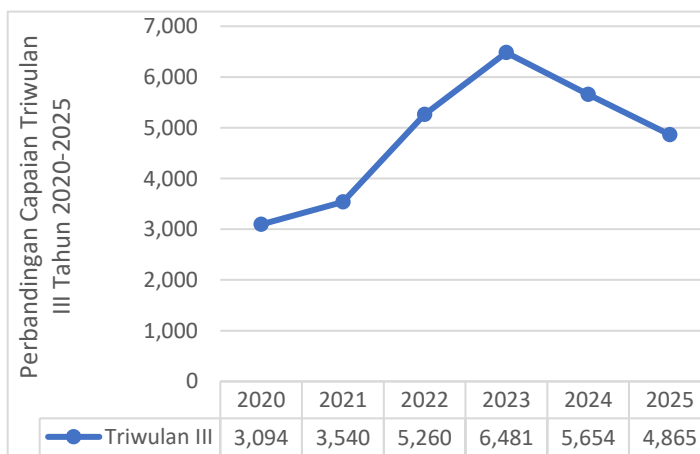


Grafik 1. Capaian PNPB Non SDA Triwulan III

2) Perbandingan antara Realisasi Kinerja dengan Triwulan Tahun Sebelumnya

Jika dibandingkan dengan realisasi di Triwulan III tahun 2024, realisasi di tahun ini terdapat penurunan penerimaan sekitar Rp789.000.000. Adapun penurunan ini terlihat signifikan pada pendapatan penggunaan sarana dan prasarana. Hal ini disebabkan oleh turunnya penyewaan ruangan atau sarana dan prasarana lainnya.

Grafik 2. Perbandingan Capaian IKU Penerimaan PNBP Triwulan III Tahun 2020 - 2025



3) Perbandingan antara Realisasi Kinerja terhadap Target Tahunan

Apabila dibandingkan dengan target tahun 2025, capaian kinerja untuk IKU ini sudah mencapai 67,19%.

4) Analisa Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja

Pencapaian IKU Penerimaan PNBP non SDA di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari Triwulan III Tahun 2025 adalah sebesar Rp4.865.432.672 atau 91,80% dari target sebesar Rp5.300.000.000. Tidak tercapainya IKU ini antara lain masih adanya pembayaran PNBP oleh pengguna layanan yang belum tepat waktu sehingga masuk dalam catatan piutang negara yang penagihan/pembayarannya dilakukan lewat tahun dan tidak tercatat sebagai PNBP tahun berjalan dengan demikian pencapaian target tidak terpenuhi.

5) Analisa Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Kegiatan yang menunjang kinerja pencapaian PNPB di antaranya PPS Kendari Kembali melakukan penandatanganan perjanjian sewa tanah dan bangunan dengan CV. Hokky Seafood Nusantara, Ahmad serta dengan Usaha Bank BRI Cabang Kendari, dan Wahwudin. Perjanjian sewa ini dilakukan melalui mekanisme pemanfaatan yang mengacu pada ketentuan PP. 28 tahun 2020. Terlampir beberapa kegiatan penunjang sebagai berikut:



Gambar 4. Kegiatan Penunjang Pencapaian PNBP Non SDA

3.2.2. Sasaran Kegiatan 2 – Produktivitas Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari Meningkat

Pada Sasaran Kegiatan Produktivitas Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari Meningkat terdapat 1 (satu) indikator yang mendukung yakni Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Ton).

Indikator Kinerja (IK-2) : Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari

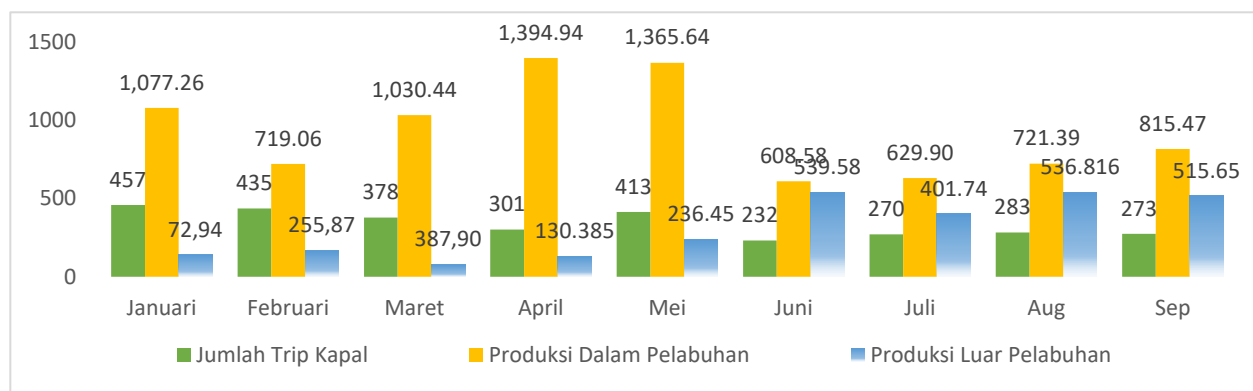
Produksi Perikanan Tangkap merupakan hasil perhitungan dari volume produksi di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kendari. Realisasi produksi perikanan tangkap diukur dan dilaporkan secara berkala setiap bulan. Adapun capaian IKU ini terlampir pada tabel sebagai berikut:

Tabel 8. Capaian Indikator Kinerja “Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari” Triwulan III Tahun 2025

Sasaran Kegiatan – 2					Produktivitas Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari Meningkat				
Indikator Kinerja – 2					Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari				
Realisasi Triwulan III Tahun 2020 – 2024					Realisasi Tahun 2025				
Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Target Tahun 2025	Target TW III	Realisasi TW III	% Realisasi thd Target TW III 2025	% Realiasi thd Target Tahun 2025
7.500	10.950	6.723,81	13.126,33	13.318,89	16.000	10.000	11.107,51	111,08	69,42

1) Perbandingan Target dengan Realisasi Triwulan III Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa capaian IKU pada Triwulan ini sebanyak 11.107,51 ton atau 111,08% dari target. Sumber produksi di PPS Kendari terdiri dari produksi dalam pelabuhan sebanyak 8.362,72 ton dan dari luar pelabuhan sebanyak 2.744,79 ton. Adapun rekap produksi bulanan tersaji pada grafik di samping.



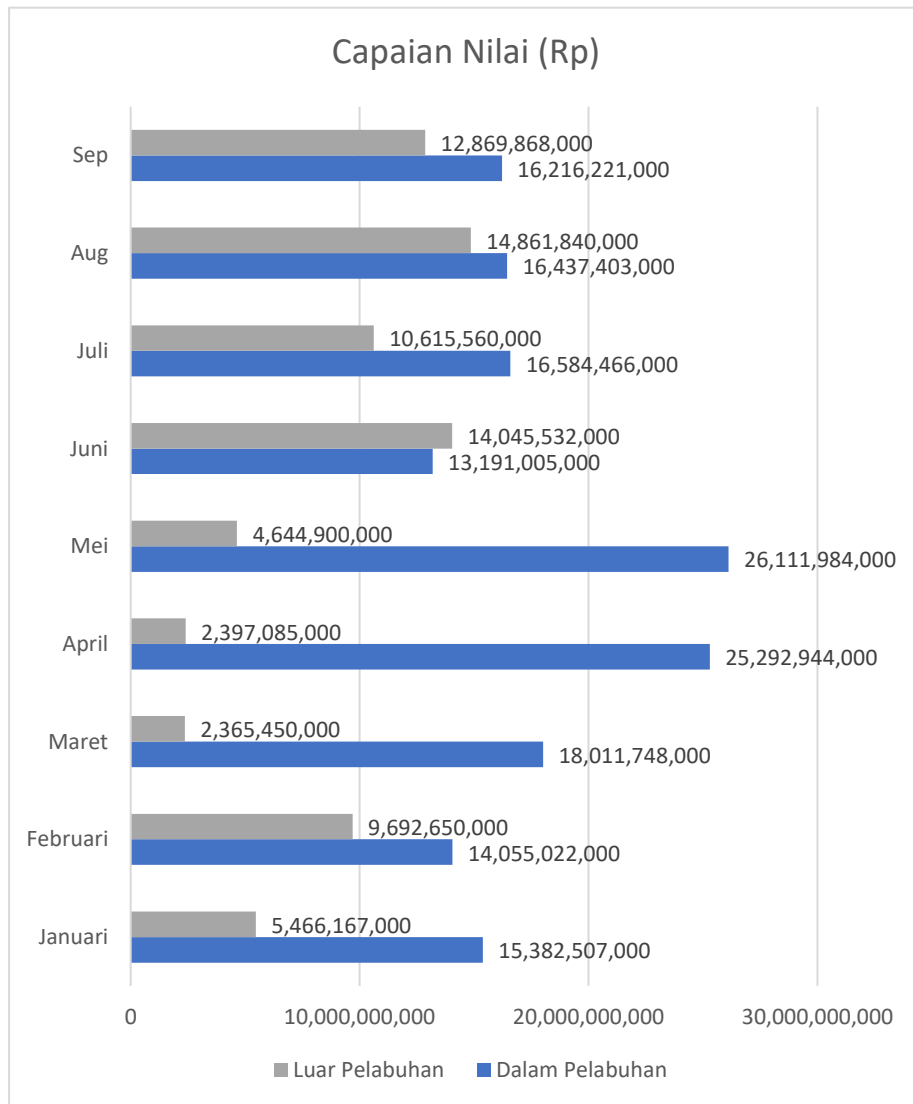
Grafik 3. Rekapitulasi Jumlah Produksi Triwulan III PPS Kendari

Apabila dihitung dalam rupiah, maka pendapatan produksi Triwulan III dapat dilihat pada grafik di samping. Capaian tertinggi pada bulan Juli untuk ikan dalam dan bulan Agustus pada ikan luar pelabuhan.

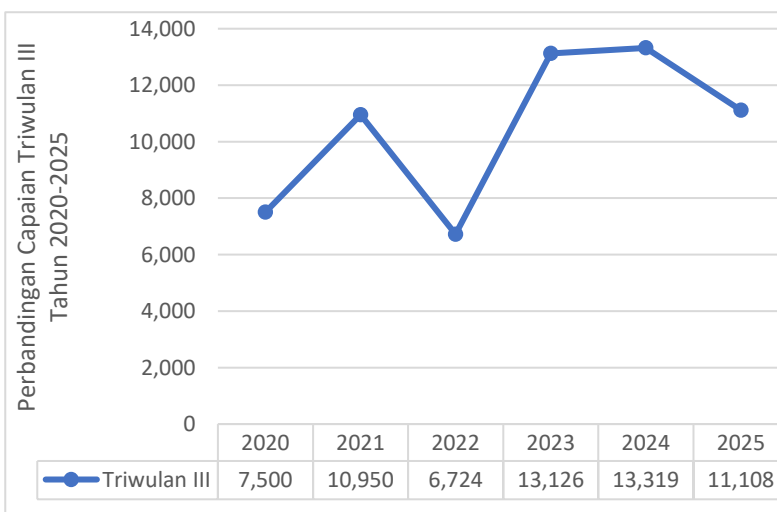
Grafik 4. Capaian Nilai Produksi Triwulan III PPS Kendari

2) Perbandingan antara Realisasi Kinerja dengan Triwulan Tahun Sebelumnya

Jika dibandingkan dengan realisasi di tahun 2024, volume produksi pada



Triwulan ini mengalami penurunan yang cukup banyak yaitu mencapai 2.211,38 ton dan merupakan capaian terendah kedua setelah tahun 2021 di sepanjang 5 tahun terakhir (pada tahun 2022, pengukuran IKU menggunakan rata-rata volume



produksi, bukan jumlah produksi). Penurunan ini disebabkan oleh cuaca buruk, kerusakan mesin, dan kerusakan alat tangkap

Grafik 5. Perbandingan Capaian Volume Produksi Triwulan III Tahun 2020-2025

3) Perbandingan antara Realisasi Kinerja terhadap Target Tahunan

Apabila dibandingkan dengan target tahunan, capaian Triwulan ini telah mencapai mencapai 69.42%.

4) Analisa Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja

Tercapainya IKU volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari pada Triwulan III tahun 2025 ini disebabkan oleh meningkatnya kepatuhan dan kesadaran pelaku usaha/pemilik kapal terhadap regulasi pembongkaran ikan, kesiapan petugas pendata dalam melakukan pencatatan hasil produksi perikanan tangkap terhadap kapal yang melakukan pembongkaran ikan di PPS Kendari.

5) Analisa Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan yang menunjang kinerja pencapaian volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari adalah sinergi pengelolaan perikanan PPS Kendari dengan melakukan rapat koordinasi WPPNRI 714 yang bertujuan untuk membahas rencana kerja tahunan UPP tahun 2025, analisa kuota penangkapan ikan tuna, serta penyusunan rencana aksi strategis dalam pengelolaan perikanan.

Selain itu, pada 16-18 Juli 2025 Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari menghadiri kegiatan Pertemuan Tahunan Unit Pengelola Perikanan (UPP) WPPNRI 713, 714, dan 715 yang bertempat di Gedung Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEKS) Universitas Hasanuddin (UNHAS), Makassar.

Selanjutnya Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari menerima kunjungan dari perwakilan Rare Indonesia pada hari Kamis, 24 Juli 2025. Kunjungan ini bertujuan untuk memperkuat sinergi dalam pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 714.





Pada triwulan II ini juga PPS Kendari dalam hal ini diwakili oleh Ketua Tim Kerja Operasional Pelabuhan menghadiri kegiatan FGD yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia Prov. Sulawesi Tenggara sebagai langkah strategis dalam mengevaluasi perkembangan hasil produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari. Kegiatan FGD ini menjadi wadah penting untuk menjadikan data produksi sebagai acuan dalam melihat dinamika, peluang,

serta kendala yang terjadi di lapangan. Tidak hanya itu, pada periode ini juga, Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (PSDI), Tenaga Ahli Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bidang perlindungan nelayan dan awak kapal perikanan bersama Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari menyelenggarakan peluncuran alat penyedia jasa pemantauan di atas kapal perikanan sebagai bagian dari upaya mendukung pengelolaan perikanan yang bertanggung jawab.





Gambar 5. Kegiatan Penunjang Pencapaian IKU Volume Produksi Perikanan Tangkap

3.2.3. Sasaran Kegiatan 3 – Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari yang Optimal dan Bertanggung Jawab

Pada Sasaran Kegiatan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari yang Optimal dan Bertanggung Jawab terdapat 5 (lima) indikator yang mendukung yakni 1) Persentase Permohonan Pengusahaan yang Dianalisa dan/atau Dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari, 2) Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari, 3) Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari, 4) Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari, dan 5) Nilai Pengendalian Lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari.

Indikator Kinerja (IK-3) : Persentase Permohonan Pengusahaan yang Dianalisa dan/atau Dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari

Sesuai dengan Permen KP Nomor 8 Tahun 2012, Pelabuhan Perikanan mempunyai fungsi pemerintahan dan pengusahaan. Sesuai dengan fungsi pengusahaan tersebut berupa penyediaan dan/atau jasa kapal perikanan dan jasa terkait di pelabuhan perikanan. Berdasarkan PP 85 Tahun 2021, jenis PNBP yang berlaku di KKP di antaranya meliputi penerimaan dari pelabuhan perikanan melalui sewa lahan/ gedung/ bangunan yang mana dalam prosesnya diperlukan analisa dan atau evaluasi permohonan pengusahaan.

Target IKU yang ditetapkan pada tahun 2025 sebesar 100% dengan periode pengukuran tahunan sehingga belum dilakukan perhitungan pada Triwulan ini. Namun, adapun capaian bulanan dokumen yang dianalisisasi dan dievaluasi pengusahaan baru, perpanjangan, serta addendum dapat disampaikan sebagai berikut:

Tabel 9. Capaian Bulanan Indikator Kinerja "Persentase Permohonan Pengusahaan yang Dianalisa dan/atau Dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari" Triwulan III Tahun 2025

Bulan	Nama Pengguna/Badan Usaha Perorangan/Instansi		Keterangan
Januari	Tidak ada permohonan		
Februari	1.	CV. Ome Trading Coy	Perpanjangan Kontrak
Maret	1.	Koperasi Pemasaran Perikanan Bina Insan Bahari	Perpanjangan Kontrak
April	1.	Koperasi Produsen Sumber Berkah Alam	Perpanjangan Kontrak
	2.	Koperasi Pemasaran Gerbas Samudera Pasific	Perpanjangan Kontrak
	3.	Hasan Tayang	Perpanjangan Kontrak
	4.	Ahmad	Perpanjangan Kontrak
	5.	Muhammad Ali	Perpanjangan Kontrak
	6.	PT. Janeea Fariz Samudera	Perpanjangan Kontrak
Mei	1.	PT. Putra Sultra Samudera	Perpanjangan Kontrak
	2.	Firman Akbar	Perpanjangan Kontrak
	3.	Rahardi Ramang	Perpanjangan Kontrak
	4.	Muhammad Asyahri	Perpanjangan Kontrak

Bulan	Nama Pengguna/Badan Usaha Perorangan/Instansi	Keterangan
	5. Andi Muhammad Said	Perpanjangan Kontrak
	6. Samria	Perpanjangan Kontrak
	7. Nasrudin	Perpanjangan Kontrak
	8. Adam Susandi	Perpanjangan Kontrak
	9. H. Jumain H. Suba	Perpanjangan Kontrak
	10. Adyatman Hajali	Perpanjangan Kontrak
Juni	1. Husriyany Rizal	Perpanjangan Kontrak
Juli	Tidak ada permohonan	
Agustus	1. Wahwudin	Perpanjangan Kontrak
September	1. PT. Global Arta Borneo	Perpanjangan Kontrak
	2. Tim Kurator PT. Berkas Manunggal Jaya	Perpanjangan Kontrak
	3. PT. Sultra Mitra Lestari	Perpanjangan Kontrak
	4. PT. Edco Putra Jaya	Perpanjangan Kontrak
	5. PT. PLN Nusantara Power	Perpanjangan Kontrak
	6. PT. Sultratuna Samudera	Perpanjangan Kontrak

Indikator Kinerja (IK-4) : Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari

Dalam upaya menilai tingkat kinerja operasional yang didasarkan atas ketentuan kriteria teknis dan operasional kelas pelabuhan perikanan (sesuai SK Dirjen Perikanan Tangkap No. 20/KEP-DJPT/2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Operasional Pelabuhan Perikanan, perubahan atas SK Dirjen Perikanan Tangkap No. 432/DJPT.3/OT.220.D3/I/2008). Sebagai bagian dari kegiatan manajemen untuk menilai kinerja pelabuhan perikanan. Adapun ruang lingkup kegiatannya meliputi 1). Administrasi dan Sistem Informasi (9 parameter), 2) Fasilitas Pelabuhan Perikanan (6 parameter), 3) Pelayanan Umum (9 parameter), 4) Investasi dan Industri (3 parameter).

Berikut parameter yang tertuang pada aplikasi PIPP yaitu: (1) Frekuensi pengiriman data (PIPP), (2) E-Logbook, (3) Aplikasi SPB Online, (4) SHTI, 5. Realisasi penyerapan anggaran, 6. Pendapatan pelabuhan, 7. Ketersediaan SDM Pengelola PP, (8). Kapasitas Daya Tampung kolam pelabuhan, (9) Panjang

Dermaga (10) Kedalaman Kolam (11) Sarana Pelabuhan (Docking,Bengkel) (12) Kelengkapan Fasilitas pemasaran dan distribusi ikan (13) Ketersediaan lahan pelabuhan (14) Pelayanan Tambat Labuh (15) Produksi perikanan (16) Frekwensi kunjungan Kapal (17) STBLKK (18) Sosialisasi dan BIMTEK (19) Fasilitas Penyuluhan, Pengawasan dan Pengendalian SDI, Perkarantinaan ikan, Publikasi (20) Pelaksanaan K5 (21) Penyaluran air bersih (Kapal dan Industri pengolahan) (22) Penyaluran Es (Kapal) (23) Penyaluran BBM (Kapal) (24) Pelayanan Pengolahan Hasil Perikanan di WKOPP (25) Pemanfatan Lahan Pelabuhan (26) Penyerapan Naker (27) Perubahan Jumlah Investor di Pelabuhan Perikanan. Adapun capaian IKU ini terlampir pada tabel di bawah ini:

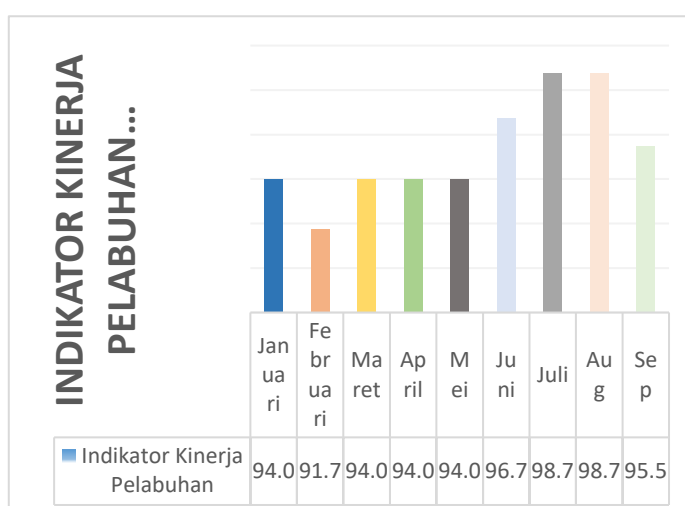
Tabel 10. Capaian Indikator Kinerja “Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari” Triwulan III Tahun 2025

Sasaran Kegiatan – 3					Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari yang Optimal dan Bertanggung Jawab				
Indikator Kinerja – 4					Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari				
Realisasi Triwulan III Tahun 2020 – 2024					Realisasi Tahun 2025				
Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Target Tahun 2025	Target TW III	Realisasi TW III	% Realisasi thd Target TW III 2025	% Realiasi thd Target Tahun 2025
84	85,67	92,17	90,80	95	87	87	97,67	112,26	112,26

1) Perbandingan Target dengan Realisasi Triwulan III Tahun 2025

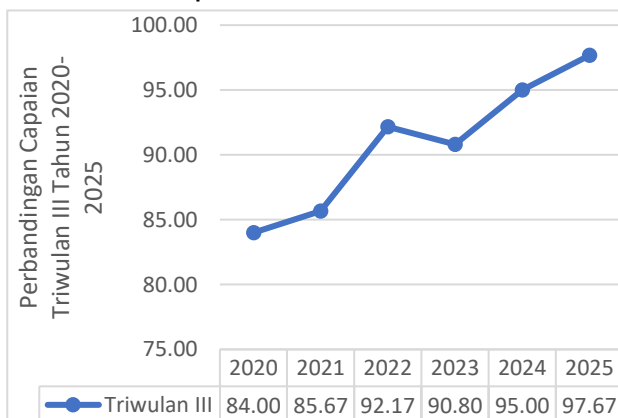
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa capaian target IKU ini sebesar 97.67 atau 112,26% dari target. Adapun rekapitulasi evaluasi kinerja aplikasi PIPP di PPS Kendari tersaji pada grafik di samping. Pada Triwulan III, nilai indikator kinerja pelabuhan PPS Kendari konsisten mendapatkan nilai di atas 90 atau predikat SANGAT BAIK.

Grafik 6. Capaian Indikator Kinerja Pelabuhan Triwulan III Tahun 2025



2) Perbandingan antara Realisasi Kinerja dengan Triwulan Tahun Sebelumnya

Jika dibandingkan dengan realisasi di tahun 2024, IKU ini mengalami peningkatan sebesar 0,5. Walaupun peningkatan ini tidak signifikan, namun dapat dijadikan sebuah motivasi agar dapat memaksimalkan capaian pada setiap indikator di aplikasi PIPP.



Selanjutnya jika dibandingkan dengan capaian pada 5 tahun terakhir, capaian pada Triwulan Ini merupakan capaian tertinggi dengan nilai yaitu 97,67.

Grafik 7. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Pelabuhan Triwulan III Tahun 2020-2025

3) Perbandingan antara Realisasi Kinerja terhadap Target Tahunan

Apabila dibandingkan dengan target tahunan, IKU ini telah mencapai target sebesar 112.26%.

4) Analisa Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja

Pencapaian IKU Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari pada Triwulan III Tahun 2025 adalah sebesar 97,67 atau 112,26%. Tercapaiannya target ini tidak terlepas kerja sama dan koordinasi antartim kerja lingkup PPS Kendari dengan memproporsikan anggaran berdasarkan indikator yang telah ditetapkan. Selama Triwulan III, PPS Kendari memperoleh penghargaan dari Direktorat Kepelabuhanan Perikanan terkait hasil penilaian evaluasi kinerja pelabuhan dengan kategori SANGAT BAIK.



Gambar 6. Sertifikat Penghargaan Indikator Kinerja Pelabuhan Triwulan III dengan predikat SANGAT BAIK

5) Analisa Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan yang menunjang kinerja pencapaian tingkat kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari seperti kegiatan Evaluasi Data PIPP dalam rangka mendukung kebijakan PIT yang akan dilaksanakan pada triwulan IV nantinya.

Indikator Kinerja (IK-5) : Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari

Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah persetujuan berlayar yang diterbitkan (bobot 40%), jumlah surat tanda bukti lapor kedatangan (STBLK) yang diterbitkan (bobot 40%), dan jumlah sertifikat hasil tangkapan ikan (SHTI) yang diterbitkan (bobot 20%). Dalam manual IKU, formula perhitungan dari ketiga pelayanan ini dibobot lalu dijumlahkan. Target dari IKU ini sebesar 85% dengan perhitungan tahunan sehingga belum dilakukan perhitungan pada Triwulan ini. Namun, adapun capaian bulanan SPB, STBLKK, jumlah kapal berpangkalan, SHTI, dan Revisi/Penolakan SHTI dapat disampaikan sebagai berikut:

Tabel 11. Capaian Bulanan Indikator Kinerja “Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari” Triwulan III Tahun 2025

Bulan	UKURAN				
	Surat	STBL	Kapal	Sertifikat Hasil	Revisi/
	Persetujuan Berlayar (SPB)	Kedatangan Kapal	Berpangkalan	Tangkapan Ikan	Penolakan SHTI
Januari	576	515	373	0	0

Bulan	UKURAN				
	Surat	STBL	Kapal	Sertifikat Hasil	Revisi/
	Persetujuan Berlayar (SPB)	Kedatangan Kapal	Berpangkalan	Tangkapan Ikan	Penolakan SHTI
Februari	451	514	396	0	0
Maret	434	418	398	0	0
April	393	341	393	0	0
Mei	440	452	440	0	0
Juni	274	268	268	0	0
Juli	307	298	307	0	0
Aug	313	315	313	0	0
Sept	319	328	319	0	0
TOTAL	3507	3449	3207	0	0



Pada Triwulan III ini juga beberapa kegiatan yang menunjang kinerja pencapaian tingkat pelayanan kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari seperti melaksanakan sosialisasi digitalisasi penerbitan Persetujuan Berlayar (PB) dan Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal (STBLKK) diruang rapat Madidihang. Kegiatan ini diikuti oleh para pemilik dan pengurus kapal perikanan yang beroperasi di kawasan Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kendari. Sosialisasi ini merujuk pada Surat Edaran Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor B.704/DJPT/HK.410/2025 yang mengatur tentang digitalisasi dalam proses penerbitan PB dan STBLKK. Langkah ini diambil guna meningkatkan efisiensi layanan, transparansi administrasi pelayanan, serta memastikan keterpaduan data kapal perikanan secara nasional. Melalui sosialisasi ini, para peserta

diperkenalkan dengan fitur-fitur utama aplikasi Teman SPB, termasuk cara pengajuan permohonan PB dan STBLKK, proses unggah dokumen, serta alur persetujuan secara digital.

Selain itu, Katimja Kesyahbandaran bersama tim melaksanakan sosialisasi pengawakan kapal perikanan di PPS Kendari. Dalam kegiatan ini, beliau menjelaskan aturan pengawakan yang tertuang dalam PP No. 27 Tahun 2021 dan Permen KP No. 33 Tahun 2021, serta menegaskan bahwa setiap awak kapal perikanan wajib memenuhi persyaratan resmi seperti SKN, SKK, BST, PKL, dan BPJS Ketenagakerjaan. Langkah ini tidak hanya memastikan kelengkapan dokumen, tetapi juga menjamin keselamatan dan keamanan awak kapal perikanan selama melaut. Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan para nelayan semakin memahami pentingnya kepatuhan terhadap regulasi agar kegiatan penangkapan ikan dapat berlangsung dengan tertib, aman, dan berkelanjutan.



Gambar 7. Kegiatan Penunjang Pencapaian Tingkat Kinerja Kesyahbandaran

Indikator Kinerja (IK-6) : Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari

Sesuai dengan Permen KP Nomor 8 Tahun 2012, Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau

bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan. Dalam rangka menunjang fungsi pelabuhan perikanan, setiap pelabuhan perikanan memiliki fasilitas yang terdiri dari fasilitas pokok, fasilitas fungsional, dan fasilitas penunjang. Pelabuhan Perikanan yang telah beroperasi dapat dilakukan pengembangan sesuai dengan kebutuhannya.

Target IKU tahun 2025 ini sebesar 80% dengan perhitungan tahunan sehingga belum dilakukan perhitungan pada Triwulan II ini. Namun, adapun capaian yang dapat dilaporkan sebagai berikut:

Tabel 12. Capaian Indikator Kinerja "Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari" Triwulan III Tahun 2025

No	Uraian Pekerjaan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)
1.	Pemeliharaan pagar kawasan	60.000.000	59.800.000	200.000
2.	Pemeliharaan sumur dalam dengan pompa (3 unit x 2 kali)	22.500.000	14.145.000	8.355.000
3.	Pemeliharaan atap kantin	39.000.000	38.900.000	100.000
4.	Pemeliharaan rusun	38.043.000	38.030.000	13.000
5.	Pemeliharaan drainase	25.000.000	24.900.000	100.000
6.	Pemeliharaan jaringan listrik dan lampu jalan	131.542.000	57.223.200	74.318.800
7.	Pemeliharaan atap TPI	77.938.000	77.800.000	138.000
8.	Pemeliharaan garasi rumah dinas	9.458.000	9.458.000	0
9.	Pemeliharaan pagar TPI	21.600.000	21.600.000	0
10.	Pemeliharaan toilet TPI	8.123.000	8.093.000	30.000
11.	Pemeliharaan deuiker dermaga	14.337.000	14.337.000	0
12.	Pemeliharaan unit pengolahan air bersih	25.000.000	24.989.000	11.000
13.	Pemeliharaan jaringan IPAL	20.000.000	9.990.000	10.010.000

No	Uraian Pekerjaan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)
14.	Pemeliharaan instalasi air bersih	35.653.000	17.979.270	17.673.730

Adapun kegiatan penunjang dalam pencapaian IKU ini yang telah dilakukan selama Triwulan III antara lain pemeliharaan instalasi air bersih yang mengalir menuju kawasan rumah dinas. Dari hasil pemeriksaan dan pemeliharaan yang dilakukan, ditemukan adanya penumpukan endapan kapur dalam pipa instalasi yang



menyebabkan aliran air menjadi terhambat. Setelah dilakukan pembersihan dan perawatan menyeluruh, aliran air kini telah kembali normal dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kegiatan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya rutin untuk memastikan kelancaran distribusi air bersih di lingkungan pelabuhan., pemeliharaan IPAL, dan jaringan listrik.

Gambar 8. Kegiatan Penunjang Pencapaian Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari

Indikator Kinerja (IK-7) : Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, persetujuan lingkungan melalui penyusunan amdal dan uji kelayakan amdal atau penyusunan formulir UKL-UPL dan pemeriksaan UKL-UPL. Sejalan dengan hal tersebut, dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan, penyelenggaraan pelabuhan perikanan yang mengoperasikan pelabuhan perikanan harus: 1) Bertanggung jawab sepenuhnya atas pengoperasian pelabuhan perikanan yang bersangkutan, 2) menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan dan lingkungan.

Menindaklanjuti hal tersebut, KKP telah memiliki suatu sistem informasi web yang disebut dengan SELARASKAN. Melalui aplikasi ini, tata kelola lingkungan di pelabuhan perikanan dapat dimonitoring mulai dari program lingkungan hingga hasil pencapaian kualitas lingkungan yang dimutakhirkan secara berkala dan dicantumkan

dalam bentuk skor pelabuhan. Adapun formula perhitungan dari aplikasi SELARASKAN ini adalah

Skor keseluruhan = Skor Indikator Program (60%) + Skor Indikator Hasil (40%).

Skor indikator program adalah program *mandatory* yang wajib dimutakhirkan dan *voluntary* (Program tidak wajib berjalan di pelabuhan perikanan) serta indikator hasil terdiri dari kebersihan pelabuhan, pengelolaan sampah, kualitas udara, kualitas air, penggunaan listrik, penggunaan air, pengelolaan limbah B3, dan kepatuhan regulasi.

Kategori yang terdapat dalam aplikasi Sistem Informasi dan Monitoring Tata Kelola Lingkungan Pelabuhan Perikanan (SELARASKAN) terdiri dari:

1. Kurang : 0 – 30
2. Cukup : >30 – 60
3. Baik: >61 – 80
4. Sangat Baik: >81 – 100

Target IKU tahun 2025 ini sebesar 30,10 dengan periode pengukuran triwulanan.

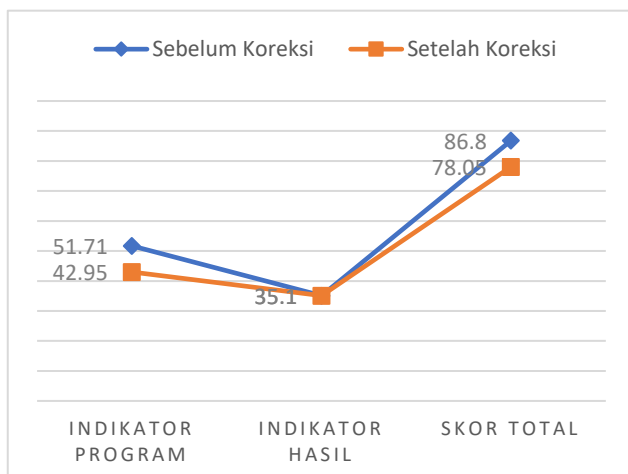
Capaian IKU ini terlampir pada tabel di bawah ini:

Tabel 13. Capaian Indikator Kinerja “Nilai Pengendalian Lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari” Triwulan III Tahun 2025

Sasaran Kegiatan – 3					Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari yang Optimal dan Bertanggung Jawab				
Indikator Kinerja – 7					Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari				
Realisasi Triwulan III Tahun 2020 – 2024					Realisasi Tahun 2025				
Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Target Tahun 2025	Target TW III	Realisasi TW III	% Realisasi thd Target TW III 2025	% Realiasi thd Target Tahun 2025
N/A	N/A	N/A	N/A	90,86	30,10	30,10	83,48	120	120

1) Perbandingan Target dengan Realisasi Triwulan III Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa capaian target IKU ini sebesar

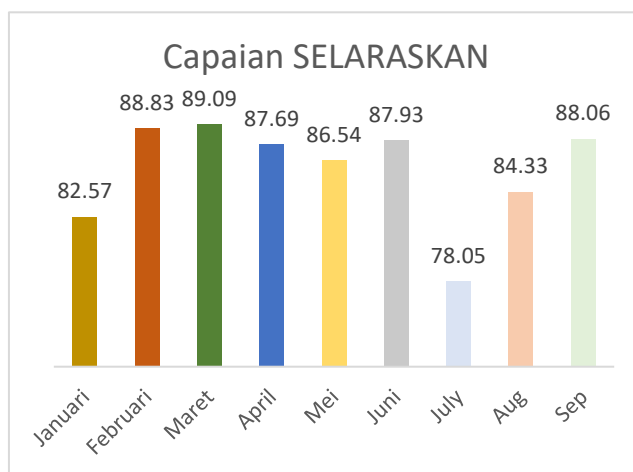


83,48 atau 120% dari target.

Adapun capaian implementasi SELARASKAN triwulan III tahun 2025 yang telah dikoreksi *evidence* oleh tim evaluasi SELARASKAN tersaji pada grafik di samping.

Grafik 8. Capaian Nilai Pengendalian Lingkungan Triwulan III

Apabila dibandingkan dengan capaian tiap bulannya, pada bulan Juli mendapatkan skor terendah yaitu 78.05 namun pada bulan berikutnya mengalami peningkatan seperti tersaji pada grafik.

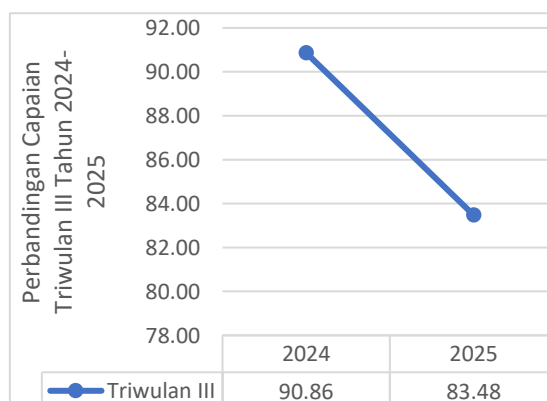


Grafik 9. Capaian Bulanan Nilai Pengendalian Lingkungan

2) Perbandingan antara Realisasi Kinerja dengan Triwulan Tahun Sebelumnya

Jika dibandingkan dengan capaian di tahun 2024, capaian di tahun ini menurun sekitar 7,38. Hal ini disebabkan banyak indikator yang mengalami penurunan dan mendapatkan koreksi dari tim penilai.

Grafik 10. Perbandingan Capaian Indikator Nilai Pengendalian Lingkungan



3) Perbandingan antara Realisasi Kinerja terhadap Target Tahunan

Apabila dibandingkan dengan target tahunan, IKU ini telah mencapai target sebesar 120%.

4) Analisa Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja

Capaian IKU di Triwulan ini yang melebihi target dipengaruhi oleh kedisiplinan petugas untuk melakukan pencatatan dan penginputan ke dalam aplikasi SELARASKAN.

5) Analisa Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan yang menunjang kinerja nilai pengendalian lingkungan diantaranya adalah kegiatan pengambilan sampel air di kawasan pelabuhan yang bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Kolaka sebagai bagian dari upaya pengendalian pencemaran dan pemantauan kualitas lingkungan. Pengambilan sampel dilakukan di tiga titik dengan tiga sampel air berbeda, yaitu pengambilan sampel air laut bertempat di area dermaga 3 (Hanggar), pengambilan sampel air limbah di kolam retensi pembuangan dari IPAL, serta pengambilan sampel air bersih di instalasi pengolahan air bersih PPS Kendari. Seluruh sampel akan dibawa ke laboratorium DLH Kolaka untuk dilakukan uji kualitas air sesuai dengan baku mutu lingkungan yang berlaku. Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen PPS Kendari dalam menjaga kelestarian lingkungan perairan pelabuhan, sekaligus mendukung penerapan sistem manajemen lingkungan yang telah tersertifikasi ISO 14001. Melalui langkah ini, PPS Kendari terus berupaya menciptakan kawasan pelabuhan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.



Gambar 9. Kegiatan Penunjang Pencapaian Nilai Pengendalian Lingkungan

3.2.4. Sasaran Kegiatan 4 – Pengelolaan Awak Kapal Perikanan, Kapal Perikanan, dan Alat Penangkapan Ikan yang Berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari

Pada Sasaran Kegiatan Pengelolaan Awak Kapal Perikanan, Kapal Perikanan, dan Alat Penangkapan Ikan yang Berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari terdapat 2 (dua) indikator yang mendukung yaitu (1) Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan dan (2) Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan

Indikator Kinerja (IK-8) : Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan

Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah dokumen kapal perikanan (sertifikat kelaikan kapal) yang diterbitkan oleh Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari. Target IKU di tahun 2025 adalah sebanyak 2333 kapal dengan periode pengukuran triwulanan. Adapun capaian pada IKU ini terlampir pada tabel berikut:

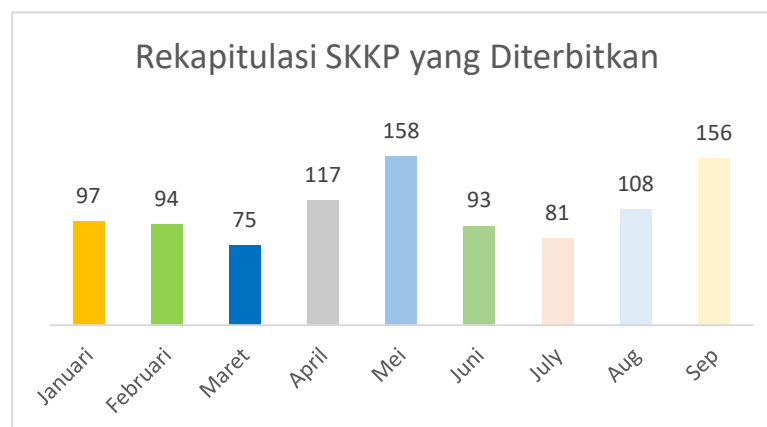
Tabel 14. Capaian Indikator Kinerja "Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan" Triwulan III Tahun 2025

Sasaran Kegiatan – 4					Pengelolaan Awak Kapal Perikanan, Kapal Perikanan, dan Alat Penangkapan Ikan yang Berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari				
Indikator Kinerja – 8					Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan				
Realisasi Triwulan III Tahun 2020 – 2024					Realisasi Tahun 2025				
Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Target Tahun 2025	Target TW III	Realisasi TW III	% Realisasi thd Target TW III 2025	% Realiasi thd Target Tahun 2025
N/A	N/A	N/A	N/A	2047	2333	2323	3262	120	120

1) Perbandingan Target dengan Realisasi Triwulan III Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa capaian target IKU ini sebesar 3262 kapal atau 120% dari target. Pada tahun 2024 yang lalu, capaian dokumen kapal yang diterbitkan sebanyak 2283 dan sesuai dengan manual IKU tahun 2025, capaian ini dapat ditambahkan dengan capaian dari triwulan I sampai triwulan pengukuran berlangsung. Pada triwulan ini bertambah sebanyak 345 kapal yang terbagi ke dalam 3 bulan yaitu juli sebanyak 81 kapal, agustus sebanyak 108 kapal,

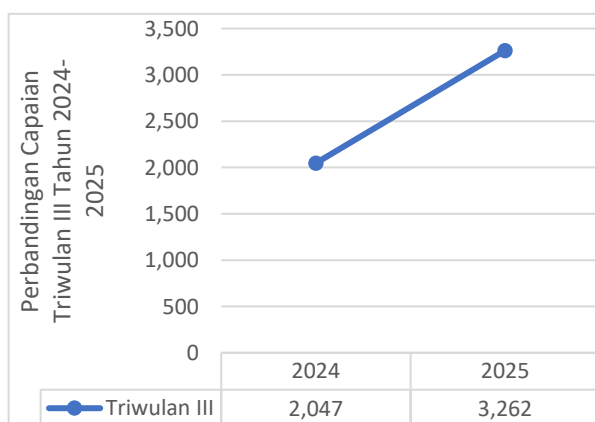
dan September sebanyak 156 kapal. Adapun rincian sertifikat kelaikan kapal perikanan (SKKP) yang diterbitkan setiap bulan tersaji pada grafik di bawah ini:



Grafik 11. Rekapitulasi Capaian Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan (SKKP) Triwulan III

2) Perbandingan antara Realisasi Kinerja dengan Triwulan Tahun Sebelumnya

Perhitungan IKU ini berdasarkan kumulatif dari triwulan bahkan tahun sebelumnya, sehingga capaiannya akan terus meningkat. Karena itu, jika dibandingkan capaian pada kurun waktu Triwulan III saja, pada tahun 2024 lalu



capaiannya sebanyak 343 kapal yang jika dibandingkan dengan capaian pada triwulan ini mengalami peningkatan dengan jumlah 345 kapal atau meningkat sebanyak 2 kapal saja atau jika dipersentasikan sebesar 0,01%.

Grafik 12. Perbandingan Capaian Indikator Kapal Perikanan Izin Daerah Triwulan III

3) Perbandingan antara Realisasi Kinerja terhadap Target Tahunan

Apabila dibandingkan dengan target tahunan, IKU ini telah mencapai target sebesar 120%.

4) Analisa Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja

Adapun analisa dari faktor-faktor yang menunjang keberhasilan capaian Indikator kinerja ini antara lain meningkatnya kepatuhan dan kesadaran pelaku usaha/pemilik kapal terhadap regulasi dan ketentuan perizinan serta adanya

kemudahan yang diberikan oleh KKP dalam proses perpanjangan SKKP melalui Surat Edaran Nomor B.2541/MEN-KP/XII/2024 tanggal 30 Desember 2024.

5) Analisa Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan yang menunjang IKU ini yaitu koordinasi P2KPI PPS Kendari Bersama KSOP Kelas II Kendari terkait Tata Cara Pelaksanaan Pengukuran Kapal Penangkap Ikan dan Penerbitan Surat Ukur Dalam Negeri Kapal Penangkap Ikan. Koordinasi ini bertujuan untuk menyamakan langkah serta memperjelas teknis pelaksanaan pengukuran kapal selama masa transisi kebijakan yang tengah berlangsung. Dalam pertemuan tersebut, dibahas berbagai hal penting mulai dari prosedur pengajuan hingga tahapan pengukuran dan penerbitan surat ukur bagi kapal penangkap ikan. KSOP Kelas II Kendari dan Tim P2KPI sepakat untuk saling mendukung agar proses pengukuran dapat dilakukan secara efektif, efisien, dan tidak mengganggu aktivitas operasional kapal perikanan di wilayah kerja PPS Kendari. Melalui koordinasi ini, diharapkan seluruh pemilik kapal perikanan dapat

segera menyesuaikan dokumen kapal mereka sesuai regulasi terbaru. PPS Kendari bersama KSOP Kelas II Kendari berkomitmen untuk terus memperkuat kolaborasi lintas sektor demi mendukung kelancaran administrasi, keselamatan pelayaran, dan legalitas operasional kapal perikanan selama masa transisi kebijakan nasional.



Gambar 10. Kegiatan Penunjang Pencapaian Kapal Perikanan Izin Daerah

Indikator Kinerja (IK-9) : Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan

Merupakan indikator yang menunjukkan pemenuhan persyaratan bekerja awak kapal perikanan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021, serta Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.2541/MEN-KP/XII/2024. Tujuan

implementasi indikator ini adalah untuk menjamin kepatuhan regulasi serta meningkatkan kesejahteraan dan keselamatan awak kapal perikanan. Tingkat pemenuhan dibagi ke dalam 4 kategori sebagai berikut:

1. Nilai $\leq 0,25$ = Kategori "Kurang",
2. Nilai $> 0,25$ s.d $< 0,50$ = Kategori "Cukup",
3. Nilai $> 0,50$ s.d $< 0,75$ = Kategori "Baik",
4. Nilai $> 0,75$ s.d $1,00$ = Kategori "Sangat Baik".

Untuk mendapatkan nilai IKU ini diformulasikan dengan perhitungan jumlah SPB terbit dikalikan dengan koefisien kondisi pemenuhan persyaratan bekerja dibagi dengan jumlah SPB terbit sesuai dengan range GT kapal. Total nilai adalah jumlah masing-masing kepatuhan di setiap range GT kapal dibagi dengan jumlah kategori range GT kapal yang terdapat di pelabuhan.

Target IKU di tahun 2025 adalah sebesar 0,26 dengan periode pengukuran semester sehingga tidak dilakukan pengukuran pada triwulan ini. Namun, beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan untuk menunjang IKU ini yaitu sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Bimbingan Teknis Sertifikasi Keterampilan Penanganan Ikan di Desa Mola Selatan, Kab. Wakatobi pada tanggal 22-23 Januari 2025. Sebanyak 23 orang peserta hadir untuk mengikuti materi terkait Prinsip Penanganan ikan diatas kapal, Kemunduran mutu Ikan, Persyaratan sanitasi dan higienis, pemeliharaan mutu, standar pembongkaran ikan, pengendalian potensi dan bahaya kontaminasi, ketelurusan SCPIB Kapal.



2. Pelaksanaan Bimbingan Teknis Sertifikasi Kecapakan Nelayan yang berlangsung selama 2 hari yaitu pada tanggal 24-25 Januari 2025 bertempat di Aula BPD Desa Mola Selatan Kec. Wangi-Wangi Selatan Kab. Wakatobi. Sebanyak 32 orang nelayan menerima materi terkait pengetahuan dasar operasi penangkapan ikan, alat tangkap, keselamatan kerja dan praktek pertolongan pertama saat terjadi kecelakaan diatas kapal.



3. Pelaksanaan Bimbingan Teknis Sertifikasi Kecakapan Nelayan yang bersinergi dengan Dinas Perikanan Kota Bau-Bau yang berlangsung selama 2 hari pada tanggal 30 April s/d 01 Mei 2025 yang bertempat di Di Aula Hotel Hing Aminah Kelurahan Batulo Kecamatan Wolio Kota Baubau. Bimtek SKN ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi nelayan atau awak kapal perikanan serta sebagai Pemenuhan persyaratan bekerja pada kapal perikanan s.d. 30 GT dimana aturan ini sudah mulai diberlakukan sejak 1 Januari 2024. Bimtek SKN dihadiri sebanyak 50 peserta, Bapak Muh. Ikram selaku Instruktur dari PPS Kendari membekali peserta dengan 2 Sub pokok materi utama yang meliputi pengetahuan dasar pelayaran dan operasi penangkapan ikan serta pengenalan keselamatan kerja dan pertolongan pertama pada saat kecelakaan.



4. Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kendari bersinergi dengan Yayasan IPNLF Indonesia dan AP2HI menggelar Bimbingan Teknis Sertifikasi Kecakapan Nelayan (SKN) yang berlangsung selama 2 hari pada tanggal 15

s/d 16 Mei 2025 yang bertempat di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari. Bimtek SKN dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi nelayan atau awak kapal perikanan serta sebagai Pemenuhan persyaratan bekerja pada kapal perikanan s.d. 30 GT dimana aturan ini sudah mulai diberlakukan sejak 1 Januari 2024. Bimtek SKN dihadiri oleh 29 peserta, Romy Rachmad Kurniawan Instruktur dari PPS Kendari membekali peserta dengan 2 Sub pokok materi utama yang meliputi pengetahuan dasar pelayaran dan operasi penangkapan ikan serta pengenalan keselamatan kerja dan pertolongan pertama pada saat kecelakaan yang disertai praktik pencegahan penanggulangan kebakaran.



5. Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kendari bersinergi dengan Dinas Perikanan Kabupaten Bombana menggelar Bimbingan Teknis Sertifikasi Kecakapan Nelayan (SKN) yang berlangsung selama 2 hari pada tanggal 15 s/d 16 Mei 2025 yang bertempat di Rumbia Tengah, Kabupaten Bombana. Bimtek SKN dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi nelayan atau awak kapal perikanan serta sebagai Pemenuhan persyaratan bekerja pada kapal perikanan s.d. 30 GT dimana aturan ini sudah mulai diberlakukan sejak 1 Januari 2024. Bimtek SKN dihadiri oleh 31 peserta, Bapak Mukhtar A.PI Instruktur dari PPS Kendari membekali peserta dengan 2 Sub pokok materi utama yang meliputi pengetahuan dasar pelayaran dan operasi penangkapan ikan serta pengenalan keselamatan kerja dan pertolongan pertama pada saat kecelakaan yang disertai praktik pencegahan penanggulangan kebakaran



6. Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kendari bersinergi dengan Yayasan IPNLF Indonesia dan AP2HI menggelar kegiatan Bimbingan Teknis Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) diatas kapal yang bertempat di Ruang Rapat Madidihang PPS Kendari. Bimtek CPIB dihadiri oleh 29 peserta, Bapak Suparjo Sianturi dan Hariyadian A. selaku pemateri dari PPS Kendari memaparkan materi terkait dasar hukum sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, tujuan penanganan ikan yang baik, beberapa faktor yang mempengaruhi kemunduran mutu ikan, Sanitation Standard Operating Procedure (SSOP) serta penerapan sistem rantai dingin untuk menjamin mutu ikan mulai dari penangkapan sampai dengan pendistribusian



7. Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kendari bersinergi dengan PT. Pahala Bahari Nusantara menggelar kegiatan Bimbingan Teknis Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) diatas kapal yang bertempat di Ruang Rapat Madidihang PPS Kendari. Bimtek CPIB dihadiri oleh 17 peserta,

Bapak Hariyadian A. dan Firman Setiawan selaku pemateri dari PPS Kendari memaparkan materi terkait dasar hukum sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, tujuan penanganan ikan yang baik, beberapa faktor yang mempengaruhi kemunduran mutu ikan, Sanitation Standard Operating Procedure (SSOP) serta penerapan sistem rantai dingin untuk menjamin mutu ikan mulai dari penangkapan sampai dengan pendistribusian.



8. Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kendari bersinergi dengan Dinas Perikanan Kabupaten Konawe menggelar kegiatan Bimbingan Teknis Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) diatas kapal yang bertempat di Aula Desa Bumi Indah, Kecamatan Lalonggaso Meeto Kabupaten Konawe. Bimtek CPIB dihadiri oleh 17 peserta, Bapak Suparjo Sianturi dan Hariyadian A. selaku pemateri dari PPS Kendari memaparkan materi terkait Cara Penanganan Ikan yg Baik di atas Kapal, HACCP Dasar, Faktor-faktor yang mempengaruhi kemunduran mutu ikan, Sanitation Standard Operating Procedure (SSOP) serta penerapan sistem rantai dingin untuk menjamin mutu ikan mulai dari penangkapan sampai dengan pendistribusian.



9. Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kendari memfasilitasi kegiatan dialog bersama Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), yang membahas percepatan penerapan Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) diatas Kapal. Kegiatan ini berlangsung di ruang rapat Madidihang PPS Kendari dan dihadiri oleh sejumlah pelaku usaha atau Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang beroperasi di sekitar pelabuhan, serta perwakilan dari PPS Kendari. Hadir pula Tenaga Ahli Menteri KKP Bidang Perlindungan Nelayan dan Awak Kapal Perikanan, serta Kepala BPPMHKP Kendari. Melalui dialog ini, para pelaku usaha diberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya sertifikasi CPIB dalam menjamin mutu hasil tangkapan sejak dari hulu, khususnya penanganan di atas kapal. Sertifikasi CPIB menjadi salah satu syarat utama dalam rantai pasok produk perikanan yang aman, berkualitas, dan berdaya saing tinggi, baik di pasar nasional maupun internasional.



10. Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kendari bersinergi dengan Fauna and Flora Indonesia serta PP. Untia menggelar Bimbingan Teknis Sertifikasi Kecakapan Nelayan (SKN) yang berlangsung selama 2 hari pada tanggal 24 s/d 25 Juli 2025 yang bertempat di Pulau Kapoposang Kab. Pangkep Sulawesi Selatan. Bimtek SKN dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi nelayan atau awak kapal perikanan serta sebagai Pemenuhan persyaratan bekerja pada kapal perikanan s.d. 30 GT dimana aturan ini sudah mulai diberlakukan sejak 1 Januari 2024.

Bimtek SKN dihadiri oleh 34 peserta, Muhammad Ikram selaku Instruktur dari PPS Kendari membekali peserta dengan 2 Sub pokok materi utama yang meliputi pengetahuan dasar pelayaran dan operasi penangkapan ikan serta pengenalan keselamatan kerja dan pertolongan pertama pada saat kecelakaan yang disertai praktik pencegahan penanggulangan kebakaran. Diharapkan ilmu yang diberikan dapat diimplementasikan dengan baik oleh seluruh peserta bimtek. Sehingga kompetensi, keselamatan kerja dan efisiensi penangkapan ikan oleh nelayan dapat meningkat.



11. Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan keselamatan kerja di laut, PPS Kendari bertindak sebagai instruktur bersama PP Untia sebagai lembaga bimtek melaksanakan Bimbingan Teknis Sertifikat Kecakapan Nelayan (SKN) yang diikuti 65 peserta nelayan di Pulau Podang-Podang, Sulsel. yang berlangsung pada tanggal 26 -27 Juli 2025. Katimja kesyahbandaran, dalam bimbingannya beliau memberikan pemahaman teknis dan legalitas kerja bagi nelayan agar lebih siap menghadapi tantangan di laut serta

meningkatkan taraf hidup mereka melalui praktik yang lebih profesional. Selanjutnya beliau menekankan pentingnya keselamatan di atas kapal, termasuk penggunaan alat keselamatan, penanganan keadaan darurat, dan praktik berlayar yang aman sesuai standar.



12. Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari berkolaborasi dengan PT. Pahala Bahari Nusantara mengadakan bimbingan teknis (bimtek) tentang Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) Pelatihan tersebut diikuti oleh peserta yang merupakan nelayan di PPS Kendari dan tamu undangan dari DKP Provinsi Sulawesi Tenggara. Dengan narasumber dari PPS Kendari, Bapak Hariyadian A. dan Suparjo Sianturi, memaparkan materi yang meliputi dasar hukum sistem jaminan mutu dan keamanan produk perikanan, tujuan dari penanganan ikan yang benar, faktor-faktor yang dapat menyebabkan penurunan kualitas ikan, Standar Prosedur Operasi Sanitasi (SSOP), serta penerapan rantai dingin untuk memastikan kualitas ikan terjaga sejak proses penangkapan hingga distribusi.

Di akhir sesi, narasumber dari tim PT. Pahala Bahari memberikan sosialisasi tentang hak-hak nelayan, kebijakan sosial FIP PS Kendari, dan upaya mitigasi bycatch terhadap spesies yang dilindungi (ETP). Diharapkan seluruh peserta dapat mengimplementasikan ilmu yang diperoleh agar mutu dan keamanan hasil perikanan tetap terjaga.



Gambar 11. Kegiatan Penunjang IKU Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan

3.2.5. Sasaran Kegiatan 5 – Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari

Pada Sasaran Kegiatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari terdapat 9 (sembilan) indikator yang mendukung yaitu: (1) Nilai PM Pembangunan Zona Integritas Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Nilai), (2) Presentase Hasil Rekomendasi Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Persen), (3) Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Nilai), (4) Indeks Profesionalitas ASN Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Indeks), (5) Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Persen), (6) Presentase Pengelolaan BMN di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Persen), (7) Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Nilai), (8) Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari, (9) Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari.

Indikator Kinerja (IK-10) : Nilai PM Pembangunan Zona Integritas Pelabuhan Perikanan

WBK adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana,

penataan sistem manajemen SDM, penguatan, pengawasan, dan pengakuan akuntabilitas kerja. Secara teknis unit kerja tersebut harus memperoleh hasil penilaian indikator proses dan memenuhi syarat indikator hasil WBK ≥ 75 dan mencapai nilai 45,10 bagi Duaan kerja yang belum atau akan dicanangkan menuju WBK.

Nilai kinerja reformasi birokrasi KKP diperoleh dari indeks reformasi birokrasi hasil penilaian Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) terhadap komponen proses yang mencakup 6 (enam) area perubahan dan komponen hasil yang mencakup 3 (tiga) komponen. Komponen tersebut adalah:

1. Manajemen perubahan;
2. Penataan tata laksana;
3. Penataan manajemen SDM aparatur;
4. Penguatan akuntabilitas;
5. Penguatan pengawasan;
6. Peningkatan kualitas pelayanan publik

Target nilai capaian pembangunan zona Integritas menuju WBK Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari adalah 75,5 dengan periode pengukurannya adalah tahunan sehingga belum dilakukan perhitungan pada Triwulan III ini. Namun, kegiatan penunjang pencapaian Nilai PM WBK ini beberapa telah dilaksanakan antara lain penandatanganan pakta integritas di PPS Kendari, penyematan secara simbolis PIN WBK untuk seluruh pegawai PPS Kendari, kunjungan lapangan dari Tim Stranas PK (Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, serta Sosialisasi dan Internalisasi petugas pelayanan dan pengurusan kapal tentang tata kelola pelayanan di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari.





Gambar 12. Penunjang Pencapaian Nilai PM WBK ZI

Indikator Kinerja (IK-11) : Presentase Hasil Rekomendasi Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari

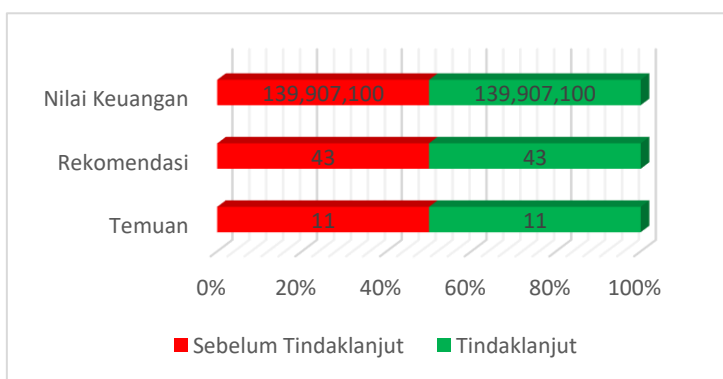
Merupakan indikator yang menilai jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Ditjen Perikanan Tangkap berdasarkan LHP (terbatas pada LHP audit, reviu, dan evaluasi baik untuk bentuk surat maupun bab) yang terbit pada Triwulan IIIV Tahun 2024 sd tahun 2025 yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh Ditjen Perikanan Tangkap yang menjadi objek pengawasan. Target IKU ini adalah 85 dengan periode pengukurannya adalah triwulanan. Capaian IKU ini terlampir pada tabel di bawah berikut:

Tabel 15. Capaian Indikator Kinerja “Presentase Hasil Rekomendasi Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari” Triwulan III Tahun 2025

Sasaran Kegiatan – 5					Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari				
Indikator Kinerja – 11					Presentase Hasil Rekomendasi Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari				
Realisasi Triwulan III Tahun 2020 – 2024					Realisasi Tahun 2025				
Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Target Tahun 2025	Target TW III	Realisasi TW III	% Realisasi thd Target TW III 2025	% Realiasi thd Target Tahun 2025
N/A	N/A	N/A	N/A	100	85	85	100	117,65	117,65

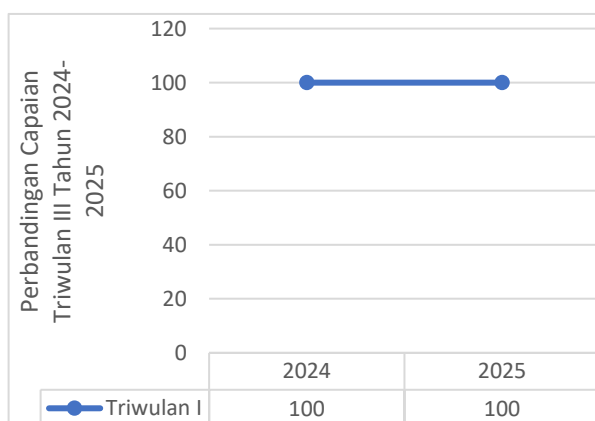
1) Perbandingan Target dengan Realisasi Triwulan III Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa capaian target adalah sebesar 100% atau 120% dari target tahunan. Seluruh hasil reviu dan evaluasi telah ditindaklanjuti di aplikasi SIDAK pada Triwulan III Tahun 2025.



Grafik 13. Grafik Capaian Presentase Hasil Rekomendasi Pengawasan Triwulan III

2) Perbandingan antara Realisasi Kinerja dengan Triwulan Tahun Sebelumnya



Apabila dibandingkan dengan capaian pada triwulan sebelumnya, capaian tahun ini sama yaitu bernilai 100% yang artinya tidak terjadi penurunan capaian dan perlu dipertahankan pada triwulan selanjutnya.

Grafik 14. Perbandingan Capaian Presentase Hasil Rekomendasi Pengawasan Triwulan III

3) Perbandingan antara Realisasi Kinerja terhadap Target Tahunan

Apabila dibandingkan dengan target tahunan, IKU ini telah mencapai target sebesar 117,65%.

4) Analisa Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja

Capaian pada IKU ini melebihi target di Triwulan III tahun 2025 disebabkan oleh terpenuhinya LHP audit, reuiu, dan evaluasi yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) pada aplikasi SIDAK.

5) Analisa Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan yang menunjang kinerja pencapaian IKU ini antara lain kegiatan monitoring dan evaluasi pelaporan yang rutin dilaksanakan.



Gambar 13. Kegiatan Penunjang Pencapaian Presentase Hasil Pengawasan Triwulan III

Indikator Kinerja (IK-12) : Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari

Indikator penilaian mandiri SAKIP adalah indikator yang mengukur implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui penilaian mandiri dengan aspek penilaian antara lain perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi kinerja.

Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari dihitung berdasarkan PermenPAN RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian dalam evaluasi atas implementasi SAKIP yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari. Adapun kategori dan predikat penilaian mandiri SAKIP sebagai berikut:

Tabel 16. Kategori Penilaian Mandiri SAKIP

Kategori	Nilai	Predikat
AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan
A	>80 – 90	Memuaskan
BB	>70 – 80	Sangat Baik
B	>60 – 70	Baik
CC	>50 – 60	Cukup
C	>30 – 50	Kurang
D	0 – 30	Sangat Kurang

Target Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari adalah 88 dengan periode pengukuran adalah tahunan sehingga belum dilakukan perhitungan pada Triwulan III ini. Namun, adapun capaian kegiatan dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 antara Direktur Jenderal Perikanan Tangkap dengan Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari pada tanggal 24 Januari 2025 sebagaimana terlampir.

<

Gambar 14. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Pada 28 Maret 2025 terjadi pergantian pejabat administrator sehingga dilakukan kembali penandatanganan Perjanjian Kinerja Perubahan I antara Direktur Jenderal Perikanan Tangkap dengan Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari yang baru, sebagaimana terlampir:

 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16 JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JRP 1004 TELEPON (021) 3116701 LACAK, FAKSIMILE (021) 3521762 LAMAR 2025.05.00.01				 NO. SASARAN KEGIATANINDIKATOR KINERJATARGET	
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA KENDARI DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP				19. Pemertaaan Pengelolaan RMA di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Persen) 20. Nilai MPFA Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Nilai) 21. Nilai Kinerja Pemantauan Anggaran Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Nilai) 22. Nilai Survei Kapasitas Masyarakat Lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Nilai)	
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini: Nama : Asep Saepulloh Jabatan : Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari Selanjutnya disebut pihak pertama Nama : Lotharia Latif Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Jakarta, 15 April 2025 Pihak Kedua Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap,  Lotharia Latif Pihak Pertama Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari,  Asep Saepulloh				NO. SASARAN KEGIATANINDIKATOR KINERJATARGET 1. Nilai PNSP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari 2. Produktivitas Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari Meningkat 3. Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari yang Optimal dan Bertanggung Jawab 4. Pengelolaan Awak Kapal Perikanan, Kapal Perikanan, dan Alat Penangkapan Ikan yang Berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari 5. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari 1. Penerimaan PNSP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Rp. Juta) 2. Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Ton) 3. Persentase Pemohonan Pengusahaan yang Diamatir dan/atau Divaluasi di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Persen) 4. Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Nilai) 5. Tingkat Pelayanan Kesejahteraan Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Persen) 6. Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Persen) 7. Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Nilai) 8. Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan (Kapal) 9. Tingkat Pemenuhan Penyerapan Bekerja Awak Kapal Perikanan (Nilai) 10. Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (yang telah dinilai WSK) (Nilai) 11. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Diamatir/atau untuk Pertukaran Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Persen) 12. Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Nilai) 13. Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Indeks) 14. Persentase Rencana Umum Pengadaan (RUJ) yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Persen) 7.241,04 16.000 100 87 85 80 30,10 2333 0,26 75,5 85 88 87 76	
Data Anggaran: NO. SASARAN KEGIATANANGGARAN RENCANAANGGARAN RIPT 1. Pengelolaan Pelabuhan Perikanan 2. Pengelolaan Survei Daya Nelayan 3. Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap Total Anggaran PPS Kendari Tahun 2025 32.263.513.000 34.910.000 19.491.400.000 81.239.044.000				Jakarta, 15 April 2025 Pihak Kedua Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap,  Lotharia Latif Pihak Pertama Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari,  Asep Saepulloh	

Gambar 15. Perjanjian Kinerja Tahun Perubahan I Tahun 2025

2. Dokumen pendukung lainnya seperti manual IKU, rincian target indikator, serta rencana aksi telah dibuat sebagaimana terlampir:

[illegible]

Kepada: 27 Januari 2025
Kepada: Mahasiswa Pascasarjana
Universitas Karsak,
Surabaya, Jawa Timur, Indonesia

[illegible][illegible][illegible]

Gambar 16. Dokumen rencana aksi, manual IKU, dan rincian indikator kinerja

3. Rapat penentuan target indikator kinerja utama tahun 2025 dan pemantauan hasil capaian IKU Triwulan III tahun 2025.
4. Publikasi capaian Indikator Kinerja Utama Semester I tahun 2025

Gambar 17. Publikasi Capaian IKU Semester I Tahun 2025



Indikator Kinerja (IK-13) : Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari

Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai pedoman bagi instansi pemerintah dalam pengukuran indeks profesionalitas ASN yang mana bertujuan untuk mengukur tingkat profesionalitas ASN dengan melakukan indentifikasi, pemetaan, pengembangan, penilaian dan evaluasi terhadap ASN. Pengukuran IP sangat bermanfaat bagi ASN sendiri, instansi pemerintah dan masyarakat pada umumnya.

Sesuai dengan Nota Dinas Plt. Kepala Biro SDM Aparatur dan Organisasi Nomor 504/SJ.3/RC.610/III/2025 tentang Hasil Rapat Pembahasan Perubahan Pengukuran Indikator Kinerja Indeks Profesionalitas ASN dan Penyesuaian Target Tahun 2025 s.d 2029 tanggal 13 Maret 2025, dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Berdasarkan surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024 tanggal 20 Juni 2024 terdapat beberapa penyesuaian pada pengukuran Indeksi Profesionalitas ASN yaitu:
 1. Nilai Indeks Profesionalitas ASN diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 dimensi meliputi kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin.
 2. Indikator dimensi kualifikasi memperhitungkan persyaratan kualifikasi pendidikan formal terakhir yang dicapai oleh ASN meliputi:
 - a. Pendidikan S-3 (Strata Tiga);
 - b. Pendidikan S-2 (Strata Dua);
 - c. Pendidikan S-1 (Strata Satu);/ D-IV (Diploma Empat);
 - d. Pendidikan D-III (Diploma Tiga);
 - e. Pendidikan D-II (Diploma Dua) /D-I (Diploma Satu) /Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)/sederajat, dan
 - f. Pendidikan di bawah SLTA
 3. Berdasarkan Surat Plt. Kepala BKN 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024 tentang pengukuran Indeks Profesionalitas ASN tahun 2023 pada tanggal 20 Juni 2024, dimensi kualifikasi memperhitungkan persyaratan kualifikasi pendidikan pada jabatan, sehingga pengukuran bobot dimensi kualifikasi berubah menjadi:

- a. ASN yang memperoleh ijazah pendidikan formal lebih tinggi/ di atas persyaratan kualifikasi pendidikan pada jabatan yang diduduki akan diberikan bobot nilai 25;
- b. ASN yang memperoleh ijazah pendidikan formal sesuai dengan persyaratan kualifikasi pendidikan pada jabatan yang diduduki akan diberikan bobot nilai 20;
- c. ASN yang memperoleh ijazah pendidikan formal di bawah persyaratan kualifikasi pendidikan pada jabatan yang diduduki akan diberikan bobot nilai 10;

Bobot dimensi kualifikasi pendidikan tersaji sebagai berikut:

Dimensi	Jabatan	Jenis Jabatan	Persyaratan Pendidikan Minimal Diangkat Kedalam Jabatan	Pendidikan yang Diperoleh Pegawai (Bobot Nilai)					
				S3	S2	SI / DIV	DIII	DII / DI / SLTA / Sederajat	Di Bawah SLTA
Kualifikasi	Manajerial	Jabatan Pimpinan Tinggi	SI / DIV	25	25	20	10	10	10
		Jabatan Administrator	SI / DIV	25	25	20	10	10	10
		Jabatan Pengawas	DIII	25	25	25	20	10	10
		Jabatan Fungsional (Kategori Keterampilan)	SLTA	25	25	25	25	20	10
	Nonmanajerial	Jabatan Fungsional (Kategori Keahlian)	DIII	25	25	25	20	10	10
		Jabatan Pelaksana	SI / DIV	25	25	20	10	10	10
			S2	25	20	10	10	10	10
			SLTA	25	25	25	25	20	10

Gambar 18. Perhitungan Dimensi Kualifikasi Pendidikan IP ASN

4. Berdasarkan Surat Plt. Kepala BKN 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024 tentang pengukuran Indeks Profesionalitas ASN tahun 2023 pada tanggal 20 Juni 2024, indikator dimensi kompetensi yang digunakan terdiri:
 - a. Bobot dasar yang diperoleh dari konversi hasil predikat kinerja pada tahun sebelumnya;
 - b. Riwayat pengembangan kompetensi melalui jalur pelatihan klasikal dan nonklasikal yang diperoleh selama tahun berjalan, meliputi:
 - 1) Diklat kepemimpinan (khusus bagi jabatan manajerial);
 - 2) Diklat fungsional (khusus bagi jabatan fungsional);
 - 3) Diklat teknis (khusus bagi jabatan pelaksana); dan
 - 4) Pengembangan kompetensi 20 JP dalam satu tahun terakhir bagi PNS atau 24JP dalam satu tahun terakhir bagi PPPK.

Pengukuran dimensi kompetensi adalah sebagai berikut:

No	Instrumen Perhitungan	Jabatan Manajerial			Jabatan Nonmanajerial	
		Jabatan Pimpinan Tinggi	Jabatan Administrator	Jabatan Pengawas	Jabatan Fungsional	Jabatan Pelaksana
1.	Hasil Penilaian Kinerja					
	- Sangat Baik	25	25	25	25	25
	- Baik	20	20	20	20	20
	- Butuh Perbaikan	15	15	15	15	15
	- Kurang / <i>Misconduct</i>	10	10	10	10	10
	- Sangat Kurang	5	5	5	5	5
2.	Diklat Kepemimpinan					
	- Sudah	10	10	10	-	-
	- Belum	0	0	0	-	-
3.	Diklat Fungsional					
	- Sudah	-	-	-	10	-
	- Belum	-	-	-	0	-
4.	Diklat Teknis					
	- Sudah	-	-	-	-	10
	- Belum	-	-	-	-	0
5.	Pengembangan Kompetensi 20 JP Setahun					
	PNS					
	>= 20 JP	5	5	5	5	5
	<20 JP	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional
	PPPK					
	>= 24 JP	5	5	5	5	5
	<24 JP	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional

Gambar 19. Perhitungan Dimensi Kompetensi IP ASN

5. Indikator dimensi kinerja yang digunakan adalah predikat kinerja yang diperoleh pada tahun sebelumnya dengan pengukuran sebagai berikut:

Dimensi	Predikat Kinerja	Bobot Nilai	
		Maksimal	Perolehan
Kinerja	Sangat Baik	30	30
	Baik		25
	Butuh Perbaikan		20
	Kurang/ <i>Misconduct</i>		15
	Sangat Kurang		10

Gambar 20. Perhitungan Dimensi Kinerja IP ASN

6. Indikator dimensi disiplin yang digunakan adalah riwayat hukuman disiplin 1 tahun terakhir yang mencakup:
- Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin;
 - Hukuman disiplin ringan;
 - Hukuman disiplin sedang;
 - Hukuman disiplin berat

Pengukuran dimensi disiplin adalah sebagai berikut:

Dimensi	Nama Hukuman Disiplin	Bobot Nilai
Disiplin	Tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin	5
	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat ringan	3
	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang	2
	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat berat	1

Gambar 21. Perhitungan Dimensi Disiplin IP ASN

7. Sumber data pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dapat diperoleh dari beberapa sumber yang tervalidasi meliputi:

- a. Dimensi kualifikasi dihitung dari jenjang pendidikan formal terakhir yang diperoleh pegawai ASN dengan ketentuan sesuai SK Pangkat terakhir atau SK pencantuman gelar yang sudah diperbaharui dengan pemutakhiran riwayat kepegawaian pada SIASN BKN yang terintegrasi dengan MyASN BKN dan SIMPEGNAS BKN;
 - b. Dimensi kompetensi diolah data hasil predikat kinerja dari e-kinerja BKN dan data riwayat pengembangan kompetensi dari SIASN BKN sesuai pemutakhiran riwayat pengembangan kompetensi yang dilakukan oleh pegawai ASN pada MyASN BKN dan oleh operator SIASN BKN;
 - c. Dimensi kinerja diolah data predikat kinerja dari e-kinerja BKN atau data riwayat kinerja pada SIASN BKN; dan
 - d. Dimensi disiplin diolah data riwayat disiplin pegawai ASN dari integrasi IDIS BKN dengan SIASN BKN dan/atau peremajaan data hukuman disiplin pada SIASN BKN.
8. Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri dari:
 - a. Kualifikasi memiliki bobot 25%;
 - b. Kompetensi memiliki bobot 40%;
 - c. Kinerja memiliki bobot 30%;
 - d. Disiplin memiliki bobot 5%

9. Berdasarkan bobot penilaian dimensi IP ASN, dilakukan perhitungan dengan rumus matematis sebagai berikut:

$$IP\ ASN = Nilai\ Kualifikasi + Nilai\ Kompetensi + Nilai\ Kinerja + Nilai\ Disiplin$$

$$IP\ ASN\ Unit\ Organisasi = \frac{Total\ Nilai\ IP\ ASN\ seluruh\ pegawai\ ASN\ unit\ Organisasi}{Jumlah\ Pegawai\ ASN\ unit\ Organisasi}$$

10. Kategori penilaian tingkat Indeks Profesionalitas ASN antara lain:

Nilai	Kategori
91-100	Sangat tinggi
81-90	Tinggi
71-80	Sedang
61-70	Rendah
60 ke bawah	Sangat rendah

Gambar 22. Kategori Penilaian Tingkat IP ASN

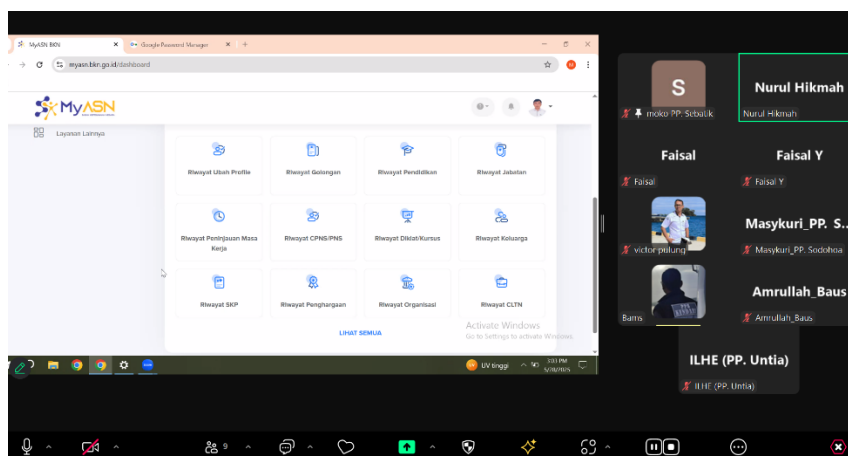
11. Penilaian IP ASN menghitung pegawai dengan status kepegawaian aktif di SIASN BKN yang berkedudukan hukum sebagai ASN yang terdiri dari:

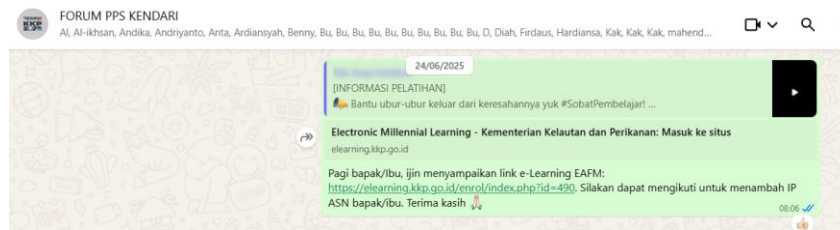
- a. PNS, dan
- b. PPPK yang telah diangkat sebelum tahun penilaian IP ASN.

12. Penilaian IP ASN mengecualikan pegawai PNS dengan status berikut:

- a. CPNS;
- b. Cuti di Luar Tanggungan Negara (CTLN);
- c. Dipekerjakan (DPK);
- d. Tugas Belajar Dibiayai.

Berdasarkan perjanjian kinerja, target IKU IP ASN Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari adalah sebesar 87 dengan pelaporan semester sehingga belum dilakukan pengukuran pada periode ini. Adapun kegiatan yang menunjang kinerja pencapaian IKU ini antara lain sosialisasi peremejaan data kompetensi pegawai ASN pada aplikasi myASN dan imbauan untuk mengikuti mengikuti diklat/seminar pada e-Milea sebagaimana terlampir:





Selain itu, PPS Kendari juga meluncurkan Aplikasi Absensi Apel Pagi sebagai bentuk inovasi dalam mendukung peningkatan disiplin dan tata kelola kehadiran pegawai. Aplikasi ini dirancang untuk mempermudah proses pencatatan kehadiran apel pagi secara real-time, efisien, dan transparan. Kegiatan launching dipimpin langsung oleh ibu Kasubag Umum bersama kepala PPS Kendari dan diikuti oleh seluruh pegawai. Dalam arahannya, beliau menyampaikan bahwa digitalisasi sistem kehadiran ini diharapkan dapat memperkuat budaya kerja yang tertib, disiplin, dan bertanggung jawab, sejalan dengan semangat reformasi birokrasi. Dengan hadirnya aplikasi ini, PPS Kendari terus berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan internal dan eksternal melalui pemanfaatan teknologi informasi. Semoga langkah ini menjadi awal yang baik menuju lingkungan kerja yang lebih profesional dan adaptif.



Gambar 23. Kegiatan Penunjang Pencapaian IP ASN PPS Kendari

Indikator Kinerja (IK-14) : Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari

Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrument penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari. Nilai pada indikator ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Renacana Umum Pengadaan (SiRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan unit kerja mandiri. Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Presentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat 1. Formula yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\text{Persentase SIRUP: } \frac{\text{Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SIRUP}}{\text{Pagu Pengadaan Barang/Jasa}} \times 100\%$$

Target Presentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang dimumkan pada SIRUP di Samudera Kendari adalah 76 dengan periode pengukuran adalah triwulan. Capaian IKU ini terlampir pada tabel di bawah berikut:

Tabel 17. Capaian Indikator Kinerja “Presentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SiRUP di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari” Triwulan III Tahun 2025

Sasaran Kegiatan – 5					Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari				
Indikator Kinerja – 14					Presentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang dimumkan pada SiRUP di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari				
Realisasi Triwulan III Tahun 2020 – 2024					Realisasi Tahun 2025				
Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Target Tahun 2025	Target TW III	Realisasi TW III	% Realisasi thd Target TW III 2025	% Realiasi thd Target Tahun 2025
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	76	76	100	120	120

1) Perbandingan Target dengan Realisasi Triwulan III Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa capaian target adalah sebesar 100% atau 120% dari target tahunan. Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari telah melakukan revisi RUP ada aplikasi SiRUP berdasarkan kertas kerja klarifikasi yang telah disusun. Adapun hasil perhitungan capaian indikator ini tersaji pada tabel berikut:

Tabel 18. Hasil Perhitungan Capaian “Presentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SiRUP di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari” Triwulan III Tahun 2025

Pagu Pengadaan			Rekap Pagu Terumumkan (SiRUP)			Selisih Pagu Pengadaan – Pagu Terumumkan	% RUP Terumumkan
Σ RUP Penyedia	Σ RUP Swakelola	Σ RUP	Σ RUP Penyedia	Σ RUP Swakelola	Σ RUP		
35.948.521.000	-	35.948.521.000	35.948.521.000		35.948.521.000	-	100%

2) Perbandingan antara Realisasi Kinerja dengan Triwulan Tahun Sebelumnya

Indikator kinerja ini merupakan IKU yang baru di tahun 2025 sehingga tidak bisa dibandingkan dengan triwulan tahun sebelumnya.

3) Perbandingan antara Realisasi Kinerja terhadap Target Tahunan

Apabila dibandingkan dengan target tahunan, IKU ini telah mencapai target sebesar 120%.

4) Analisa Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja

Capaian pada IKU ini melebihi target di Triwulan III tahun 2025 disebabkan oleh terinputnya seluruh paket pengadaan barang/jasa di aplikasi SiRUP.

5) Analisa Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan yang menunjang kinerja pencapaian IKU ini antara lain penginputan paket pengadaan barang/jasa, pelaksanaan pengadaan barang/jasa, dan pencatatan hasil pengadaan barang/jasa pada aplikasi AMEL.

Indikator Kinerja (IK-15) : Persentase Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari

Penyelenggaraan pemerintahan negara yang efektif dan efisien sangat membutuhkan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai yang terkelola dengan baik dan efisien. Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah mengatur mengenai Perencanaan Kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, Penilaian, Penghapusan, Pemindahtanganan, Penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Dalam pelaksanaannya, pengelolaan Barang Milik Negara semakin berkembang dan kompleks, belum dapat dilaksanakan secara optimal karena adanya beberapa permasalahan yang muncul serta adanya praktik pengelolaan yang penanganannya. Indikator ini merupakan indikator yang menggambarkan persentase pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari yang telah dilaksanakan dengan ketentuan yang berlaku. Persentase pengelolaan BMN ini diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

- a. Tingkat pemanfaatan rencana kebutuhan BMN (RKBMN) (12,5%)
- b. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal yang sudah BAST (25%)
- c. Tersedianya usulan penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi rusak berat baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25%)
- d. Penggunaan BMN hasil pengadaan barang modal yang didukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/ Berita Acara Pemakaian (bobot 25%)

- e. Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (bobot 12,5%)

Target presentase pengelolaan BMN kerja Perikanan Samudera Kendari adalah 81 dengan periode pengukuran tahunan sehingga belum dilakukan perhitungan pada Triwulan ini.

Indikator Kinerja (IK-16) : Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari

Pencapaian indikator ini yakni nilai kinerja anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan yang merupakan amanat dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249 Tahun 2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Adapun aspek yang dinilai adalah aspek implementasi yang terdiri atas 12 (dua belas) komponen yakni (1) Revisi DIPA (2) Halaman IV DIPA (3) Pengelolaan UP (4) Rekon LPJ Bendahara (5) Data Kontrak (6) Penyelesaian Tagihan (7) Penyerapan Anggaran (8) Retur SP2D (9) Perencanaan Kas (10) Pengembalian SPM (11) Dispensasi Penyampaian SPM, dan (12) Pagi Minus. Adapun pengelompokkan hasil penilaian adalah sebagai berikut :

- a. Revisi DIPA, dihitung berdasarkan jumlah revisi anggaran K/L per Satker. Data revisi DIPA yang digunakan adalah untuk data revisi yang bersifat pergeseran (dalam hal pagu tetap), dengan rumusan sebagai berikut:

$$\left(\frac{\sum \text{Target Revisi DIPA}}{\sum \text{Revisi DIPA}} \right)$$

- b. Halaman IV DIPA, Dihitung berdasarkan rata-rata gap antara realisasi dengan rencana penarikan dana (% gap realisasi terhadap rencana). Angka gap per bulan yang diambil bernilai absolut sehingga dalam perhitungan rata-rata gap tidak saling meniadakan, dengan rumusan sebagai berikut:

$$\text{Rata - rata } \left\| \frac{((\text{Realisasi Penarikan Dana}) - (\text{Perencanaan Hal III DIPA}))}{(\text{Perencanaan Hal II DIPA})} \right\|$$

- c. Pengelolaan UP, Dihitung berdasarkan jumlah GUP yang tepat waktu dibagi seluruh record GUP yang terdapat dalam set data, dengan rumusan sebagai berikut:

$$\left(\frac{\sum \text{SPM GUP yang disampaikan tepat waktu}}{\sum \text{SPM GUP}} \right) \times 100$$

- d. Rekon LPJ Bendahara, Dihitung berdasarkan rasio LPJ Bendahara yang tepat waktu disampaikan terhadap seluruh LPJ Bendahara yang di sampaikan ke KPPN, dengan rumusan sebagai berikut:

$$\left(\frac{\Sigma \text{Data LPJ Bendahara yang disampaikan tepat waktu}}{\Sigma \text{LPJ Bendahara yang disampaikan ke KPPN}} \right) \times 100$$

- e. Data Kontrak, dihitung berdasarkan rasio data kontrak yang tepat waktu disampaikan terhadap seluruh kontrak yang disampaikan ke KPPN, dengan

$$\left(\frac{\Sigma \text{Data kontrak yang disampaikan tepat waktu}}{\Sigma \text{data kontrak yang disampaikan ke KPPN}} \right) \times 100$$

rumusan sebagai berikut:

- f. Penyelesaian Tagihan, Dihitung berdasarkan rasio penyelesaian tagihan yang tepat waktu dibagi dengan seluruh SPM LS Non Belanja Pegawai (yang tepat waktu dan terlambat) yang terdapat dalam set data, dengan rumusan sebagai berikut:

- g. Penyerapan Anggaran, dihitung berdasarkan persentase realisasi anggaran

$$\left(\frac{\Sigma \text{Tagihan yang disampaikan tepat waktu}}{\Sigma \text{Total Tagihan}} \right) \times 100$$

terhadap pagunya. Target penyerapan anggaran K/L untuk I sebesar 15%, II

$$\left(\frac{\Sigma \text{Realisasi Anggaran}}{\Sigma \text{Pagu}} \right) \times 100$$

40%, III sebesar 60% dan sebesar 90%. K/L dengan tingkat realisasi diatas target per triwulan ke atas di berikan nilai maksimal, dengan rumusan sebagai berikut:

- h. Retur SP2D, dihitung dengan membandingkan jumlah retur SP2D dengan Jumlah SP2D yang terbit, dengan rumusan sebagai berikut:

$$\left(\frac{\Sigma \text{Retur SP2D}}{\Sigma \text{SP2D}} \right) \times 100$$

- i. Perencanaan Kas, dihitung berdasarkan rasio Renkas yang tepat waktu disampaikan sesuai nilai rencana penarikan dan kategori KPPN terhadap seluruh Renkas yang disampaikan ke KPPN, dengan rumusan sebagai berikut:

$$\left(\frac{\Sigma \text{data Renkas yang disampaikan tepat waktu}}{\Sigma \text{Renkas yang disampaikan ke KPPN}} \right) \times 100$$

- j. Pengembalian SPM, dihitung berdasarkan rasio pengembalian SPM terhadap seluruh SPM yang diterbitkan Kementerian/Lembaga (Jumlah SPM yang diterbitkan KL termasuk Jumlah SPM yang salah/ditolak). Dengan rumusan sebagai berikut:

$$\left(\frac{\Sigma \text{SPM salah}}{\Sigma \text{Total SPM yang disampaikan ke KPPN}} \right) \times 100$$

- k. Dispensasi penyampaian SPM, dihitung berdasarkan rasio dispensasi SPM terhadap seluruh SPM yang diterbitkan K/L (Jumlah SPM yang diterbitkan K/L termasuk jumlah SPM yang salah/ditolak) dengan rumusan sebagai berikut:
- l. Pagu Minus, dihitung berdasarkan persentase pagu minus terhadap pagunya,

$$\left(\frac{\Sigma \text{Dispensasi SPM}}{\Sigma \text{Total SPM yang disampaikan ke KPPN}} \right) \times 100$$

dengan rumusan sebagai berikut:

$$\left(\frac{\Sigma \text{Pagu Minus}}{\Sigma \text{Pagu}} \right) \times 100$$

Pengukuran dan pelaporan indikator ini dilakukan setiap bulannya dengan mengacu kepada realisasi dua belas komponen yang terdapat pada Monev PA Pada Aplikasi OM- SPAN. Target nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari Tahun 2024 ini adalah sebesar 92 dengan periode pelaporan adalah semester sehingga belum ada pengukuran pada periode ini.

Indikator Kinerja (IK-17) : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari

Indikator ini merupakan indikator yang menunjukkan pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas pelaksanaan RKA/KL melalui aplikasi SMART DJA. Cakupan evaluasi kinerja meliputi aspek implementasi, aspek manfaat, dan aspek konteks.

Pengukuran indikator ini mengacu pada hasil perhitungan dari aplikasi SMART DJA Kementerian Keuangan dengan target sebesar 86 dan periode pelaporan adalah tahunan. Sesuai dengan Nota Dinas Kepala Biro Keuangan dan BMN Nomor 3250/SJ.2/TU.210/IX/2024 tanggal 12 September 2024 tentang Revisi Target dan Manual IKU NKA KKP TA. 2024, formula IKU ini diperoleh dari penggabungan 50% nilai kinerja perencanaan anggaran dan 50% dari nilai kinerja pelaksanaan anggaran. Nilai kinerja perencanaan anggaran diperoleh melalui pengukuran atas:

- a. Variabel efektivitas (bobot 75%) yang didasarkan pada capaian Rincian Output (RO) pada level satuan kerja, capaian indikator kinerja program pada level unit Eselon I, dan capaian indikator kinerja sasaran strategis pada level K/L, dan;
- b. Variabel efisiensi (bobot 25%) yang didasarkan pada hasil perbandingan antara indeks realisasi anggaran dengan indeks standar biaya keluaran

(SBK) sesuai PMK Nomor 113 tahun 2023 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2024.

Berkaitan dengan hal tersebut, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan telah melakukan pemetaan RO pada RKA-K/L TA. 2025 yang diwajibkan menggunakan Standar Biaya Keluaran Umum (SBKU) sebagai dasar penilaian kinerja perencanaan anggaran TA. 2025.

Pengukuran indikator ini mengacu pada hasil perhitungan dari aplikasi Monev Kemenkeu dengan target sebesar 71 dan periode pelaporan adalah tahunan sehingga belum dapat dilakukan pengukuran pada periode ini.

Indikator Kinerja (IK-18) : Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari

Indikator ini merupakan indikator IKU baru yang menunjukkan kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik (PermenPAN RB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik).

Perhitungan IKU ini melihat dari hasil perhitungan 9 unsur pelayanan yang didapatkan dari seluruh unit penyelenggara pelayanan lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (Persyarata layanan, kemudahan prosedur, waktu penyelesaian, kesesuaian biaya, kesesuaian produk, kecepatan produk, kemudahan fitur/kemampuan petugas, kualitas isi/sarana, layanan konsultasi). Hasil perhitungan ini diperoleh dari aplikasi SI SUSAN KKP, yaitu aplikasi yang dikembangkan oleh PUSDATIN KKP sebagai tindak lanjut pengisian SKM di lingkup KKP.

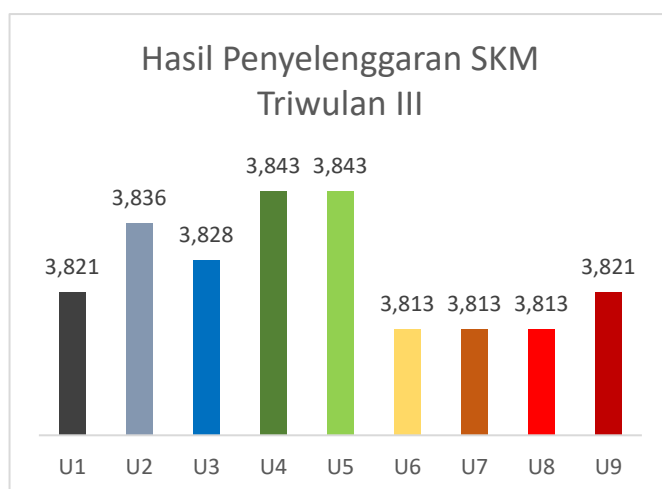
Target IKU ini sebesar 88,50 dengan periode pelaporan adalah triwulan. Adapun capaian pada IKU ini tersaji pada tabel di bawah ini:

Tabel 19. Capaian Indikator Kinerja “Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari” Triwulan III Tahun 2025

Sasaran Kegiatan – 5					Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari				
Indikator Kinerja – 18					Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari				
Realisasi Triwulan III Tahun 2020 – 2024					Realisasi Tahun 2025				
Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Target Tahun 2025	Target TW III	Realisasi TW III	% Realisasi thd Target TW III 2025	% Realiasi thd Target Tahun 2025
N/A	N/A	N/A	N/A	88,68	88,50	88,50	95,71	108,14	108,14

1) Perbandingan Target dengan Realisasi Triwulan III Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa capaian target adalah sebesar 95,71 atau 108,14% dari target tahunan. Jumlah responden pada Triwulan III ini berjumlah 134 orang. Seluruh unsur pelayanan (U1 Persyaratan Layanan, U2 Kemudahan Prosedur, U3 Waktu Penyelesaian, U4 Kesesuaian Biaya, U5 Kesesuaian Produk, U6 Kecepatan Respon/Kompetensi Petugas, U7

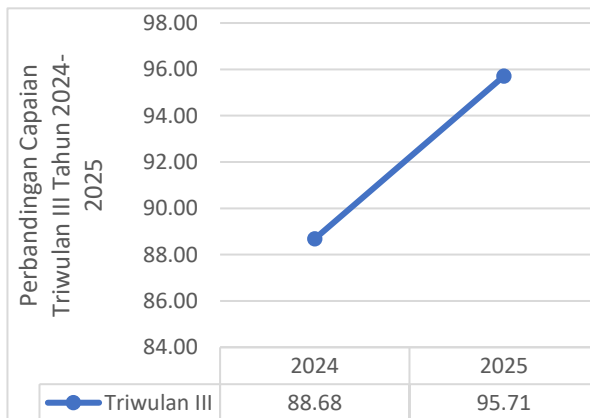


Kemudahan Fitur/Kemampuan Petugas, U8 Kualitas Isi/Sarana, U9 Layanan Konsultasi) mendapatkan nilai lebih dari nilai rata-rata yaitu 3,75. Adapun rincian hasil SKM terlampir sebagaimana grafik di samping.

Grafik 15. Grafik Hasil Penyelenggaraan SKM Triwulan III

2) Perbandingan antara Realisasi Kinerja dengan Triwulan Tahun Sebelumnya

Apabila dibandingkan dengan capaian IKU pada triwulan di tahun sebelumnya,



capaian pada tahun ini naik sebesar 7,03 poin. Meningkatnya jumlah responden sebanyak 29 orang sangat berpengaruh terhadap tingginya capaian di triwulan III tahun ini.

Grafik 16. Perbandingan Capaian SKM Triwulan III Tahun 2024 – 2025

3) Perbandingan antara Realisasi Kinerja terhadap Target Tahunan

Apabila dibandingkan dengan target tahunan, IKU ini telah mencapai target sebesar 108,71%.

4) Analisa Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja

Pencapaian IKU ini adalah sebesar 95,71 atau 108,1% yang melebihi dari target Triwulan III tahun 2025. Terdapat 3 unsur pelayanan yang mendapat nilai tertinggi yaitu unsur kesesuaian biaya dan kesesuaian produk sebesar 3,843 serta kemudahan prosedur sebesar 3,836. Semua nilai tiap unsur juga memiliki nilai di atas rata-rata yaitu 3,75. Jumlah responden ini juga lebih banyak dari triwulan sebelumnya yaitu sebanyak 134 orang.

5) Analisa Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan yang menunjang kinerja pencapaian IKU yang telah dilakukan pada Triwulan III ini adalah publikasi hasil SKM melalui sosial media.

4.2 REALISASI ANGGARAN

Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari pada tahun 2025 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp51.259.064.000 sesuai dengan DIPA Ditjen Perikanan Tangkap Tahun Anggaran 2025. Realisasi anggaran sampai Triwulan III sebesar Rp12.747.609.337 atau 24.87%. Adapun rincian realisasi anggaran sebagai berikut:

Tabel 20. Pagu dan Realisasi Keuangan Triwulan III Tahun 2025 Berdasarkan Jenis Belanja

No	Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi	
			Nilai (Rp)	Capaian (%)
1.	Pegawai	10.163.200.000	8.323.828.799	81.90
2.	Barang	11.438.344.000	4.423.780.538	38.68
3.	Modal	1.531.520.000	0	0
Jumlah		51.259.064.000	12.747.609.337	24.87

Tabel 21. Pagu dan Realisasi Keuangan Triwulan III Tahun 2025 Berdasarkan Kegiatan

No	Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi	
			Nilai (Rp)	Capaian (%)
1.	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	32.263.573.000	734.299.226	2.28
2.	Pengelolaan Sumber Daya Ikan	34.010.000	5.085.000	14.95
3.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	18.961.481.000	12.008.225.111	63.33
Jumlah		51.259.064.000	12.747.609.337	24.87

BAB IV PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

**4.2 TINDAKLANJUT REKOMENDASI PERIODE
SELANJUTNYA**

4.3 REKOMENDASI TINDAKLANJUT

BAB IV

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari merupakan salah satu unit eselon eselon II di lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan yang memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang perikanan tangkap. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari berlandaskan kepada tujuan, sasaran dan program kerja yang telah diterapkan dalam Renstra PPS Kendari dan Perjanjian Kinerja antara Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dan Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari.

Laporan Kinerja (LKj) Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari Triwulan III Tahun 2025 menyajikan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) selama Triwulan III Tahun 2025. Terhadap capaian IKU tersebut dilakukan analisis dan evaluasi serta perbandingan terhadap capaian IKU tahun sebelumnya sebagai bahan analisis dan evaluasi lebih lanjut untuk menilai keberhasilan.

Dalam rangka peningkatan kinerja PPS Kendari, informasi capaian dan permasalahan yang dituangkan dalam Laporan Kinerja akan menjadi bahan perbaikan di triwulan selanjutnya. Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi, pada Nilai Capaian Sasaran Strategis (NPSS) PPS Kendari sebesar 110,70 atau berpredikat **ISTIMEWA**. Capaian keseluruhan indikator yang dilaporkan pada Triwulan III ini adalah sebanyak 6 IKU & IKM bernilai Istimewa (nilai di atas 110), dan 2 IKU & IKM bernilai Baik (nilai 90- <110). Hasil evaluasi realisasi kegiatan dan anggaran pada Triwulan III tahun 2025 tercapai Rp12.747.609.337 atau sebesar 24.87% dari total pagu sebesar Rp51.259.064.000.

4.2. TINDAK LANJUT REKOMENDASI PERIODE SEBELUMNYA

Adapun rekomendasi perbaikan pada periode sebelumnya yaitu Triwulan II tahun 2025 yang telah ditindaklanjuti pada periode ini yaitu:

1. Melakukan evaluasi terhadap pencapaian target nilai pengendalian lingkungan. (*Data dukung terlampir*)

2. Melakukan rapat evaluasi dan monitoring pelaksanaan kegiatan baik terkait realisasi anggaran maupun realisasi fisiknya. (*Data dukung terlampir*)

4.3. REKOMENDASI TINDAK LANJUT

Berdasarkan pembahasan pencapaian indikator kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari Triwulan III tahun 2025, rekomendasi/hal yang disarankan untuk peningkatan kinerja guna pencapaian target tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi lebih lanjut terhadap pencapaian target nilai pengendalian lingkungan yang mengalami penurunan tiap triwulan.
2. Melakukan rapat evaluasi dan monitoring pelaksanaan kegiatan baik terkait realisasi anggaran maupun realisasi fisiknya.

LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025





**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3521782
LAMAM www.kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA KENDARI
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Syahril Abd. Raup**

Jabatan : Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Lotharia Latif**

Jabatan : Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

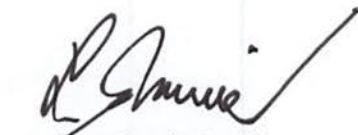
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 24 Januari 2025

Pihak Kedua
Direktur Jenderal
Perikanan Tangkap,


Lotharia Latif

Pihak Pertama
Kepala Pelabuhan Perikanan
Samudera Kendari,


Syahril Abd. Raup

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA KENDARI
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari	1	Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Rp. Juta)	7,241.04
2	Produktivitas Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari Meningkat	2	Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Ton)	16.000
3	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari yang Optimal dan Bertanggung Jawab	3	Persentase Permohonan Pengusahaan yang Dianalisa dan/atau Dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Persen)	100
		4	Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Nilai)	87
		5	Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Persen)	85
		6	Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Persen)	80
		7	Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Nilai)	30,10
4	Pengelolaan Awak Kapal Perikanan, Kapal Perikanan, dan Alat Penangkapan Ikan yang Berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari	8	Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan (Kapal)	2333
		9	Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan (Nilai)	0,26
5	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari	10	Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (yang telah dinilai WBK) (Nilai)	75,5
		11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Persen)	85
		12	Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Nilai)	88
		13	Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Indeks)	87
		14	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Persen)	76

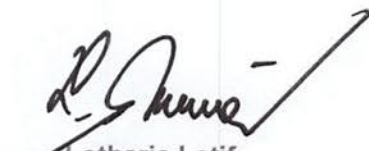
NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		15 Persentase Pengelolaan BMN di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Persen)	81
		16 Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Nilai)	92
		17 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Nilai)	71,5
		18 Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Nilai)	88,5

Data Anggaran:

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	32.263.573.000
2.	Pengelolaan Sumber Daya Ikan	34.010.000
3.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	18.961.481.000
Total Anggaran PPS Kendari Tahun 2025		51.259.064.000

Jakarta, 24 Januari 2025

Pihak Kedua
Direktur Jenderal
Perikanan Tangkap,


Lotharia Latif

Pihak Pertama
Kepala Pelabuhan Perikanan
Samudera Kendari,


Syahril Abd. Raup

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 PERUBAHAN I





**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3521782
LAMAM www.kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA KENDARI
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Asep Saepulloh**

Jabatan : Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Lotharia Latif**

Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 15 April 2025

Pihak Kedua
Plt. Direktur Jenderal
Perikanan Tangkap,



Lotharia Latif

Pihak Pertama
Kepala Pelabuhan Perikanan
Samudera Kendari,



Asep Saepulloh

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA KENDARI
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari	1 Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Rp. Juta)	7.241,04
2	Produktivitas Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari Meningkat	2 Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Ton)	16.000
3	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari yang Optimal dan Bertanggung Jawab	3 Persentase Permohonan Pengusahaan yang Dianalisa dan/atau Dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Persen)	100
		4 Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Nilai)	87
		5 Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Persen)	85
		6 Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Persen)	80
		7 Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Nilai)	30,10
4	Pengelolaan Awak Kapal Perikanan, Kapal Perikanan, dan Alat Penangkapan Ikan yang Berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari	8 Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan (Kapal)	2333
		9 Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan (Nilai)	0,26
5	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari	10 Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Nilai)	75,5
		11 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Persen)	85
		12 Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Nilai)	88
		13 Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Indeks)	87
		14 Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Persen)	76

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
15		Persentase Pengelolaan BMN di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Persen)	81
16		Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Nilai)	92
17		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Nilai)	71,5
18		Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Nilai)	88,5

Data Anggaran:

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	32.263.573.000
2.	Pengelolaan Sumber Daya Ikan	34.010.000
3.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	18.961.481.000
Total Anggaran PPS Kendari Tahun 2025		51.259.064.000

Jakarta, 15 April 2025

Pihak Kedua
Plt. Direktur Jenderal
Perikanan Tangkap,



Lotharia Latif

Pihak Pertama
Kepala Pelabuhan Perikanan
Samudera Kendari,



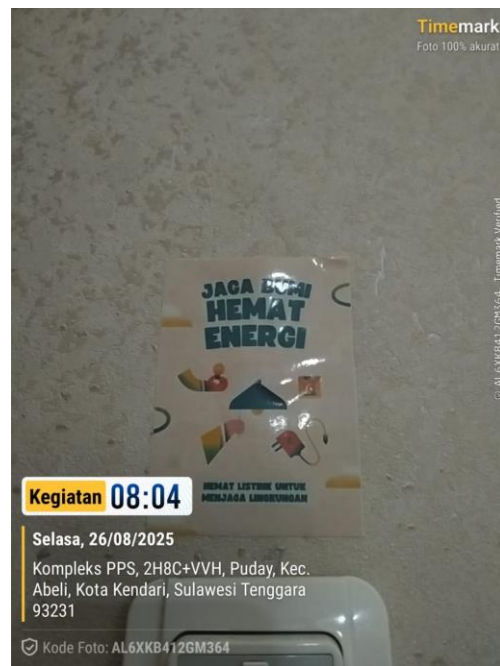
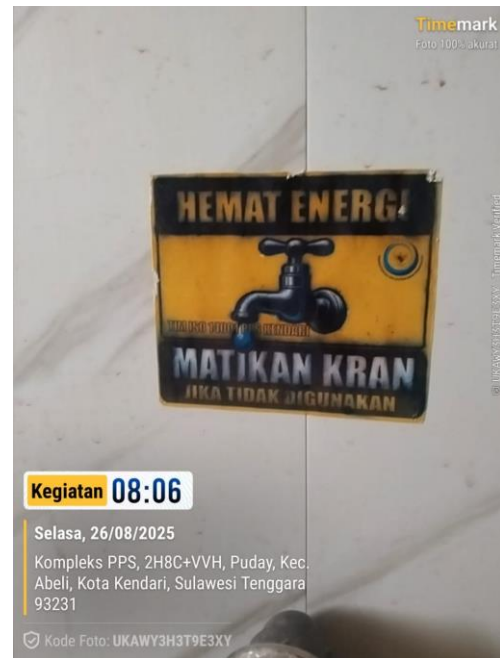
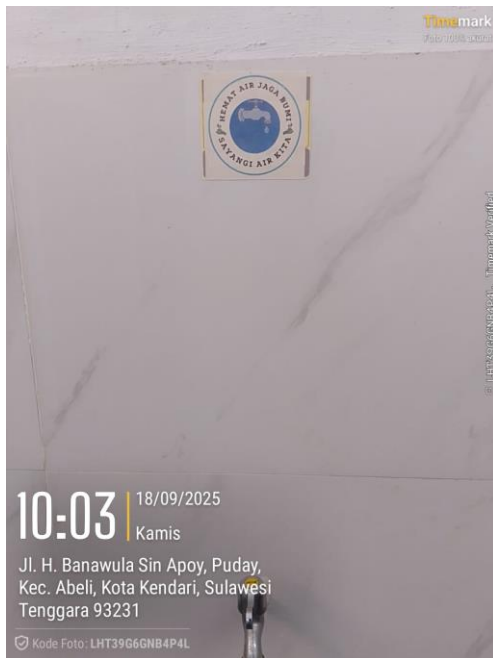
Asep Saepulloh

TINDAKLANJUT TRIWULAN II TAHUN 2025

**MELAKUKAN EVALUASI TERHADAP
PENCAPAIAN TARGET NILAI
PENGENDALIAN LINGKUNGAN**

Melakukan Evaluasi terhadap Pencapaian Target Nilai Pengendalian Lingkungan

(Pemasangan sticker hemat energi sebagai salah satu dokumentasi untuk data dukung aplikasi Selaraskan)



TINDAKLANJUT TRIWULAN II TAHUN 2025

**MELAKUKAN RAPAT EVALUASI DAN
MONITORING PELAKSANAAN KEGIATAN**



NOTULEN RAPAT

A. Dasar:

Instruksi Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari.

B. Pelaksanaan:

Hari/Tanggal	: Selasa, 8 Juli 2025
Jam	: 09.00 WITA - selesai
Tempat	: Ruang Rapat Cakalang
Agenda	: Rapat Revisi POK PPS Kendari
Peserta	: Daftar Hadir/Dokumentasi Terlampir

C. Hasil Rapat:

Pada hari ini, Selasa tanggal 08 Juli 2025 telah dilaksanakan rapat dalam rangka pembahasan revisi POK PPS Kendari. Setelah melalui diskusi diperoleh risalah rapat sebagai berikut:

1. Rapat dipimpin oleh Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari yang dihadiri oleh para ketua tim kerja, pengelola anggaran, pengelola keuangan dan perwakilan anggota dari setiap tim kerja.
2. Salah satu faktor dilakukan revisi anggaran adalah berdasarkan tingkat urgensi kegiatan di PPS Kendari. Beberapa revisi POK meliputi :
 - a. Pengadaan ATK untuk pelayanan di terpadu dan tim kerja lainnya dengan memperhatikan rincian kebutuhan setiap tim kerja.
 - b. Pemeliharaan mesin cold storage direvisi menjadi Rp 11.000.000
 - c. Sosialisasi perusahaan dalam rangka penerapan PP 28 Tahun 2021 dapat direvisi untuk kegiatan lain di pelayanan usaha yang lebih urgent misalnya atribut kelengkapan kerja petugas PNPB (jas hujan, rompi, topi)
 - d. Pengadaan brosur/leaflet dan Xbenner dialokasi untuk kegiatan PPS Kendari seperti HUT PPS Kendari, HUT Republik Indonesia dan spanduk yang sudah rusak.
 - e. Kasubag umum agar mengkoordinasikan rencana pengadaan peralatan untuk kegiatan K5 ke Koordinator Kebersihan.
 - f. Tim kerja kesyahbandaran mengidentifikasi kebutuhan pencetakan blanko dan menyerahkan daftarnya ke kasubag umum. Selain itu tim syahbandar menyerahkan timeline jadwal layar.
 - g. Kegiatan desiminasi layanan kesyahbandaran dialihkan untuk peralatan sarana.

- h. Kegiatan sosialisasi keselamatan berlayar bagi nelayan (Morowali) dialihkan ke perlengkapan petugas kesyahbandaran.
 - i. Kegiatan sosialisasi keselamatan berlayar bagi nelayan (Mangolo) sisanya dialihkan ke kegiatan sarana.
 - j. Pemeliharaan peralatan dan mesin untuk menunjang operasional pelabuhan untuk segera dikoordinasikan terkait pelaksanaannya.
3. Revisi POK tim kerja TKSP meliputi :
- a. Pemeliharaan gudang sarana, dan pemeliharaan CCTV dialihkan ke pemeliharaan listrik (travo)
 - b. Pemeliharaan jaringan IPAL dialihkan ke pemeliharaan atap TPI
 - c. Pemeliharaan instalasi air bersih dialihkan sebagian untuk pemeliharaan instalasi listrik.
 - d. Penimbunan tanah jalur instalasi air bersih dialihkan keseluruhan ke pemeliharaan atap TPI.
 - e. Audit Internal ISO 9001:2015 dialihkan ke pemeliharaan alat pemadam kebakaran.
 - f. Permintaan Dir. KP untuk mempersiapkan rencana kegiatan sosialisasi pengembangan pelabuhan eco fishing port segera dikoordinasikan untuk sosialisasi internal.
 - g. Operasional unit pengolahan LPP WPPNRI 714 mendukung perikanan terukur di zona 03 untuk segera dikoordinasikan dan direvisi.
 - h. Bangunan gedung kantor permanen direvisi untuk pekerjaan pengecatan kantor.
 - i. Bangunan mandi cuci kakus (MCK) untuk pengadaan 2 fiber.
 - j. Ketas Thermal untuk operasional pas masuk agar dikoordinasikan rencana kebutuhannya dalam setahun ini.
4. Revisi POK Tim Kerja Dukman meliputi :
- a. Eksploitasi mesin pemotong rumput untuk BBM mesin pemotong rumput segera dikoordinasikan.

Notulis,



Dewa Ayu Diah Wulandari

DOKUMENTASI REVISI POK PPS KENDARI

DAFTAR HADIR



DAFTAR HADIR RAPAT

Hari/Tanggal : Selasa / 08 Juli 2025
 Jam : 09-00 WITA - Selesai
 Acara/Kegiatan : Rapat Revisi Pok

NO	NAMA	JABATAN / INSTANSI	TANDA TANGAN
1.	Asep. Sagaribata	Kelabak	
2.	Rusdian. D	Dukun	
3.	MUKETIM	Operasi	
4.	M. IKRAM	Kesyahbandaran	
5.	Budi Santoso	Pelayanan Usaha	
6.			
7.	Nurul Hikmah	Analisis SDMA	
8.	Sri Hermawati	Operasional	
9.	Purwanto	Staf Keuangan	
10.	Made Benny W.	Kesyahbandaran	
11.	Nurhlm	Staf Keuangan	
12.	Saiful F	Staf Barisan	
13.	Devi Ayu Diah Wicentini	Staf Kepeg	
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			



NOTULEN RAPAT

A. Dasar:

Instruksi Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari.

B. Pelaksanaan:

Hari/Tanggal : Senin, 21 Juli 2025
Jam : 08.00 WITA - selesai
Tempat : Ruang Rapat Cakalang
Agenda : Rapat Pimpinan (Evaluasi Kinerja Mingguan) PPS Kendari
Peserta : Daftar Hadir/Dokumentasi Terlampir

C. Hasil Rapat:

Pada hari ini, Senin tanggal 21 Juli 2025 telah dilaksanakan rapat dalam Rapat Pimpinan Evaluasi Kinerja Mingguan PPS Kendari. Setelah melalui diskusi diperoleh risalah rapat sebagai berikut:

1. Rapat dipimpin oleh Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari yang dihadiri oleh para ketua tim kerja, pengelola anggaran, pengelola keuangan dan perwakilan anggota dari setiap tim kerja.
2. Tim Kerja Kesyahbandaran:
 - a. Dipantau untuk pengisian BBM
 - b. Terkait realisasi anggaran BBM yang akan dilaksanakan secepatnya
 - c. Terkait realisasi anggaran ATK di pelabuhan binaan untuk segera dilaksanakan.
 - d. Tim kerja kesyahbandaran sudah menindaklanjuti surat penyampaian ke 2 untuk pemilik kapal terkait kapal yang tenggelam di PPD1.
 - e. Terkait alat tangkap akan ditindaklanjuti oleh tim Universitas Halu Oleo untuk melakukan kajian.
3. Tim Kerja TKSP :
 - a. Koordinasikan terkait penataan kabel PLN di perumahan bukit asam
 - b. Terkait jalan pas masuk untuk dicarikan anggaran pemeliharannya
 - c. Pemeliharaan pengecatan kantor untuk segera dilaksanakan
 - d. Terkait pengadaan pompa celup, pemeliharaan gedung, pemeliharaan atap TPI, dan lainnya bersifat urgent dan masih dicarikan untuk anggarannya.
 - e. Terkait instalasi air bersih untuk aliran air bersih ke perumahan dinas masih dilakukan pemeliharaan, saran untuk perJumat 25 juli 2025 dilakukan kerja bakti terkait pemeliharaan tersebut.

- f. Terkait dengan kabel yang terkelupas untuk dikoordinasikan kepada pihak PLN untuk membawa kabel pengganti.
 - g. Terkait ruang pengarsipan untuk dibenahi instalasi listriknya dan penambahan ac pada ruang tersebut.
4. Tim Kerja Dukman :
- a. Terkait SPBy Pembayaran dari masing-masing Katimja untuk lebih diperhatikan.
 - b. Terkait Pengganti PJLP Humas untuk segera ditindaklanjuti
 - c. Terkait mesin finger print untuk di cek kembali
 - d. Diagendakan perpisahan purna pensiun untuk Ibu Hj. Jawiah
 - e. Terkait revisi terakhir belum dimasukan untuk revisi pemeliharaan atap TPI
 - f. Membuat kartu kontrol terkait spj keuangan permenkp 56 tahun 2024
 - g. Realisasi anggaran sudah mencapai sekitar 56,01 %
 - h. Terkait mesin finger print akan dipasang cctv pemantauan saat melakukan absen.
5. Tim Kerja Operasional :
- a. Berkaitan dengan migrasi masih menunggu surat edaran, untuk kapal-kapal yang masih izin daerah akan dialihkan migrasi.
 - b. Berkaitan pemburuan PNBPN dipantau dan dilaporkan tiap hari.
 - c. Evaluasi data PIT ada 2x kegiatan berkaitan dengan WPPNRI 714
 - d. Kegiatan sosialisasi CPIB bekerja sama dengan BPPMHKP
 - e. Berkaitan dengan Suspen bukan kebijakan dari PPS Kendari
6. Tim Kerja Pelayanan Usaha :
- a. Melaporkan terkait PNBPN Non SDA pemantauannya
 - b. Estimasi PNBPN Non SDA bisa mencapai 100% sampai akhir tahun.

Notulis,



Dewa Ayu Diah Wulandari

DOKUMENTASI RAPAT PIMPINAN EVALUASI KINERJA MINGGUAN PPS KENDARI



DAFTAR HADIR



DAFTAR HADIR RAPAT

Hari/Tanggal : Senin / 21 Juni 2025
 Jam : 08.00 WITA - selesai
 Acara/Kegiatan : Rapat Pimpinan evaluasi kinerja Mingguan

NO	NAMA	JABATAN / INSTANSI	TANDA TANGAN
1.	Asep Saepulloh	Kepala PPS Kendari	
2.	MUKHTAR	Operasional	
3.	Rachman	Bukana	
4.	M. IKRAM	Kesyahbandaran	
5.	I Wayan Budiarta	APK APBN	
6.	NurLini	Pranubakti	
7.	Uld. Nuziani	Penelola keuangan	
8.	Suwarsono	-	
9.	Budi Santoso	Tim Kerja pelayanan usaha	
10.	Sri Hermawaty	ops	
11.	Made Benny W.	Kesyahbandaran	
12.	Romy Rachmad. K.	Asisten SPN	
13.	Nurul Hikmah	Asisten SPN	
14.	Purwanto	Tata Kelola Umulm	
15.	KUBAN NADFI 12	Tata Kelola Sman Pasaran	
16.	Deva Ayu Diah Umarani	Tata Kelola Sman & Pasaran	
17.			
18.			
19.			
20.			

PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA KENDARI
 Jl. Samudera No.1 Puday, Kota Kendari Sulawesi Tenggara, 93233
 Telp. (0401) 3190868 Fax. (0401) 3190868 Email : infoppskd@yahoo.co.id

Layanan Pengaduan



SCAN ME